

k a l i m a t u n

SaWa

Sahaja dan Setara dalam Keragaman - *Modest & Equal in Diversity*

PEMBAURAN

Kacang Cina, Gula Jawa

pasang surut
Integrasi Etnis Cina

Pendidikan
Sebagai Upaya Integrasi Bangsa

Michael Utama Purnama

ISSN 1693-1521

Vol. 02, No. 02, 2004



Dari Redaksi

Jawa atau Cina Sama Saja. **3**

Kalimah Utama

Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia:

Pendekatan Politik versus Pendekatan Budaya (Riset Redaksi),
oleh **Mh. Zaelani Tammaka. 5**

Laporan: PEMBAURAN CINA - JAWA. Sebuah Keniscayaan? (*Tim Laput*). **8**

Artikel

PASANG SURUT INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT ETNIS CINA DI SURAKARTA, oleh **Soedarmono. 19**

SKBRI: Produk Hukum Peminoran Kaum Minoritas, oleh **Moch. Yamin. 24**

Kolom

SEJARAH PERANAN DAN POTENSI MASYARAKAT ETNIS CINA DI SURAKARTA,

oleh **M. Hari Mulyadi. 31**

Profil

Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS),

Menyuarakan Kebersamaan Multietnis dalam Nuansa Lokal, Rif'atul Khoiriyah. 35



Hasil Diskusi

Kebangkitan Islam adalah Kebangkitan Seluruh Umat, **Rif'atul Khoiriyah. 41**

Hasil Penelitian

PEREMPUAN CINA DALAM

SASTRA MELAYU TIONGHOA, **Chusniatun, M. Thoyibi. 45**

Kalimah Berita 48-49

Feature Budaya

MASYARAKAT TIONGHOA SURAKARTA, **Ali Sadli. 50**

Muhibah

BELAJAR DARI PENGALAMAN BERKUNJUNG KE AMERIKA, **Zakiyuddin Baidhawiy. 53**

Cara mendapatkan Buletin **KALIMATUN SAWA'** : Kirimkan identitas institusi/person/media Anda beserta alamat, insya-Allah akan kami kirimkan gratis. Informasi yang kami muat di Buletin ini dapat dikutip atau disiarkan tanpa ijin asal menyebut sumber. Apabila Anda memiliki informasi/ide tentang budaya dan perubahan sosial yang perlu disebarluaskan ke masyarakat, silahkan kirim insya-Allah kami muat. Anda dapat menghubungi kami ke alamat : **Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (Center for Cultural Studies and Social Change)**, Jl. A. Yani 1, Pabelan, Surakarta 57102, INDONESIA Telp. 62(0271)717417 ext. 191, 158; fax. 62(0271)715448, email: psb_ums@hotmail.com., **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.**

SUSUNAN PENGELOLA KALIMATUN SAWA': **Pemimpin Umum:** Yayah Khisbiyah, **Pimpinan Redaksi:** M.Thoyibi, **Redaktur Ahli:** Musa Asy'arie, Darajat AR., Mh. Zaelani Tammaka, Zakiyuddin Baidhawiy, **Redaktur Pelaksana:** Wawan Kardiyanto, **Sekretaris:** Rif'atul Khoiriyah, **Keuangan:** Dwi Setyaningsih, **Sidang Redaksi:** Almuntaqo Zain, Slayer, Ali Moh. Sadli, Fajar Riza Ul Haq, **Design Lay-out & Tata Letak:** Awan Lembayung, **Sirkulasi:** Farid Darmawan.



Tak seorang pun pernah berkeinginan dilahirkan berkulit putih, kuning, sawo matang, atau hitam.

Tak seorang pun pernah meminta terlahir berambut kejur, ikal, ataupun keriting. Tak seorang pun pernah berdoa untuk terlahir bermata biru, cokelat, ataupun hitam. Tak seorang pun pernah bermaksud untuk dilahirkan sebagai kaukasus, negroide, ataupun melanesia. Bahkan, mungkin tak seorang pun pernah berkehendak untuk dilahirkan.

Terlahir adalah produk dari kombinasi proses-proses rumit di luar kemampuan dan kehendak diri sendiri. Terlahir merupakan sebuah fakta masa lalu yang tak mungkin diubah, dihapus atau dibuang. Terlahir adalah sebuah keharusan tanpa pilihan.

Seandainya boleh memilih, Adam akan lebih suka tinggal di surga daripada terlempar ke dunia. Seandainya boleh memilih, manusia akan lebih suka tinggal di rahim ibu. Karena rahim ibu merupakan replika surga yang segalanya serba membahagiakan. Dalam rahim ibu, manusia tak pernah merasa kepanasan, kedinginan, kelaparan, atau kehausan. Dalam rahim ibu,

manusia tak pernah merasa sedih, takut, bingung atau kecewa.

Tapi tak seorang pun berhasil bertahan di rahim ibu. Melalui proses-proses tertentu, manusia dipaksa untuk keluar dan diputuskan dari berbagai bentuk pertalian alami dengan sang ibu. Alhasil, manusia pun terlahir.

Seandainya boleh memilih, manusia akan lebih suka menjadi bayi atau anak kecil. Bayi atau anak kecil tak pernah merasa gelisah ataupun sedih, bahkan pada saat mereka menangis sekalipun. Bagi bayi atau anak

kecil menangis bukan berarti sedih. Berdasarkan kesederhanaan pengalaman mereka, menangis

merupakan cara efektif untuk mengundang perhatian dan meminta belaian kasih sayang.

Tapi tak seorang pun berhasil bertahan menjadi bayi atau anak kecil. Dia dipaksa tumbuh dan berkembang menjadi remaja/dewasa, menghadapi tantangan dan permasalahan.

Seandainya boleh memilih, manusia akan lebih suka menjadi manusia remaja/dewasa. Remaja/dewasa merupakan puncak kecantikan, puncak ketampanan, puncak kematangan, puncak kekuatan, puncak kejayaan, dan puncak prestasi.

Tapi tak seorang pun berhasil bertahan menjadi remaja/dewasa tanpa harus layu di lanjut usia atau mati. Secara perlahan tetapi pasti, unsur-unsur ketuaan berdatangan, atau secara tiba-tiba ajal menjelang.

Seandainya boleh memilih, mungkin semua orang ingin terlahir berkulit putih, kuning, sawo matang, atau hitam. Seandainya boleh memilih, mungkin semua orang ingin terlahir berambut

Jawa atau Cina Sama Saja

pirang, merah, ataupun hitam kelam. Seandainya boleh memilih, mungkin semua orang ingin terlahir bermata lebar atau sipit.

Atau justru sebaliknya ...

Seandainya boleh memilih, mungkin tak seorang pun ingin terlahir berkulit putih, kuning, sawo matang atau hitam.

Seandainya boleh memilih, mungkin tak seorang pun ingin terlahir berambut pirang, merah, atau hitam.

Dan, seandainya boleh memilih, mungkin tak seorang pun ingin terlahir bermata lebar atau sipit.

Oleh karena itu, tak seorang pun bisa memilih untuk terlahir sebagai anak dari pasangan **George Bush, George Soros, Usama bin Ladin, Saddam Husein, Muammar Khadafy, Li Tek Tjeng, Mahathir Mohammad, Soeharto, Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Kromo Tukang Tambal Ban,** atau **Fulan.**

Terlahir adalah sebuah keharusan sejarah. Terlahir berarti dimulainya penitisan jembatan *shiratal mustaqim*, yang setiap jengkalnya dapat membuat manusia terpelanting dan terjerembab ke dasar neraka Jahanam. Terlahir berarti dimulainya pendakian licin dan terjal lereng keimanan, yang setiap jengkalnya dapat membuat manusia terpeleset dan terlempar ke dasar kehinaan dan kekufuran. Tetapi, terlahir juga berarti

peletakan batu pertama pembangunan istana keabadian, yang setiap jengkalnya menawarkan kebahagiaan surga Aden. Terlahir juga berarti harapan dan peluang manusia atas pemulihan kemuliaan sifat-sifat ketuhanannya.

Tidak ada kelebihan antara orang Cina, Jawa, dan Arab. Tak ada kelebihan Abdul dari Jonathan, Joko, Hashimoto, Rajiv, Kim atau Tan.

Lalu, mengapa orang harus menanggung beban sejarah yang tidak dibuatnya sendiri? Mengapa orang harus menderita penghinaan atau celaan hanya karena berbeda warna kulit, rambut, atau mata? Mengapa orang merasa lebih dari yang lain hanya karena yang lain itu berbeda dari dirinya? Mengapa orang lebih suka memperlakukan masa lalu daripada masa mendatang, yang masih bisa dirancang dan dibangun?

Sungguh Maha Adil Tuhan, yang tak pernah melihat perbedaan fisik sebagai kelebihan atau kekurangan. Sungguh Maha Adil Tuhan, yang hanya melihat

nilai manusia pada ketakwaan mereka.

Makna manusia bukan pada warna kulitnya, bukan pada warna atau bentuk rambutnya, bukan pada warna atau bentuk matanya, bukan pada kelembatan janggutnya, bukan pada kelebaran surbannya, bukan pada kemewahan rosarionya, bukan pula pada huruf-huruf yang merajut namanya.

Tak ada kelebihan ABDUL dari JONATHAN, JOKO, HASHIMOTO, RAJIV, KIM, atau TAN.

Menjadi manusia berarti selalu berada di persimpangan jalan, yang setiap detik harus memutuskan secara sadar arah yang akan ditempuhnya. Menjadi manusia berarti berada

dalam situasi harus memilih, sejak membuka mata di pagi hari hingga menutup mata di malam hari. Oleh karena itu, makna manusia terletak pada akumulasi keputusan-keputusan moral yang diambilnya; makna manusia terletak pada kumpulan dari pilihan-pilihan sadar yang dibuatnya. Akumulasi keputusan dan pilihan inilah nilai ketakwaan—sebuah harga yang tak pernah bisa ditakar oleh orang lain. Dan itu berlaku bagi semua, tanpa pandang kulit, rambut atau mata.

Oleh karena itu, tak ada yang salah bila seseorang menjadi Jawa atau Cina. Di depan Tuhan, Jawa atau Cina sama saja. □

Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia: Pendekatan Politik versus Pendekatan Budaya

Pada bulan Juni 1985, empat puluhan pakar dari berbagai disiplin ilmu—mulai sejarawan, ekonom, antropolog hingga ilmuwan politik—bertemu dalam suatu simposium di Australian National University (ANU) di Canberra. Simposium yang melibatkan cendekiawan terkemuka dari berbagai universitas di Australia, Amerika Serikat dan Asia Tenggara tersebut membahas topik yang senantiasa krusial dan aktual, yaitu masalah identitas orang Tionghoa atau Cina di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Hasil simposium tersebut kemudian dibukukan

dengan judul *Changing of Identities of the Southeast Asian Chinese since World War II* (Jennifer Cushman dan Wang Gung Wu, 1988).

Khusus tentang Indonesia, sebagaimana dicatat Wang Gungwu dalam artikel editorialnya, politik integrasi dan identitas Cina menunjukkan gambaran yang paling rumit, bahkan kontradiktif, dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Di satu pihak, norma politik sangat memberatkan orang Cina sehingga tidak banyak pilihan bagi mereka. Akses kepada norma budaya Cina dibatasi hingga

minimal dan sebagai gantinya mereka dipaksa mengikuti standar normatif identitas nasional keindonesiaan. Di lain pihak, lebih separo populasi Cina di Indonesia gagal memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Akibatnya, selain tetap sebagai warga negara asing dan berperilaku sebagai Cina totok, mereka hanya memfokuskan diri untuk menjaga keberlangsungan dan keberhasilan hidup. Inilah yang kemudian membawa mereka lebih sukses di bidang ekonomi dan sektor swasta.

Apa yang disimpulkan oleh simposium tersebut tampak aktual hingga kini. Lihatlah, ketika Indonesia mengalami krisis dan iklim ekonomi tidak lagi kondusif, para taipan etnis Tionghoa begitu mudah mengambil sikap untuk mengalihkan modalnya ke negara lain, bahkan bagi yang sudah memiliki status WNI sekali pun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas keindonesiaan yang selama ini didoktrinkan oleh pemerintah tidaklah begitu membekas. Sikap mendua mereka—para



Salah satu tokoh wayang dalam cerita wayang kulit Jawa dan salah satu tokoh wayang Cina, ekspresi integrasi budaya. (Dok. PSB-PS)



Boneka-boneka Cina, ekspresi budaya etnis Cina yang kembali bangkit setelah tercerabut oleh rejim Orba. (Dok. PSB-PS, repro internet)

warga etnis Tionghoa—di antaranya lebih disebabkan oleh ambivalensi kebijakan politik nasional Indonesia yang juga “bermata dua” terhadap etnis Tionghoa.

Bila ditilik secara kesejarahan, masalah integrasi sosial etnis Tionghoa atau Cina di Indonesia memang boleh dibilang persoalan yang tiada ujung, karenanya tidak kunjung usai. Setiap zaman, setiap periode, persoalan ini selalu mengemuka dengan kekhasan masing-masing—sesuai dengan latar sosial-budaya-historis masing-masing zaman. Dimulai

sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara (pra-Indonesia) hingga era reformasi saat ini. Masalah tersebut senantiasa muncul seperti mata rantai yang tiada putus-putusnya.

Tampaknya, dalam hal identitas, etnis Tionghoa di Indonesia secara kultural memang unik dibandingkan etnis-etnis yang lain, bahkan dengan etnis Arab atau Barat sekali pun. Nama-nama Arab atau pun nama-nama Barat begitu “biasa” dipakai oleh etnis yang bersangkutan, bahkan oleh etnis asli sekali pun, tanpa menimbulkan persoalan “integrasi bahasa” sedikit pun. Tetapi, begitu mendengar nama-nama Cina, jangankan dipakai oleh etnis lain,

dipakai oleh etnis yang bersangkutan pun terasa “tidak biasa”. Bahkan, pada periode tertentu sejarah negeri ini, para warga etnis Cina harus mengubah namanya dengan nama-nama yang dianggap lebih “mempribumi” untuk mendapatkan status ke-WNI-annya.

Mengapa posisi etnis Tionghoa menjadi begitu “unik” di negeri ini? Kajian terhadap ini sudah banyak dilakukan orang dengan latar belakang keilmuan tidak kalah beragamnya pula. Mulai dari sosiolog, antropolog, ahli politik, sejarawan, ahli ekonomi, hingga peneliti sastra. Berbagai asumsi, hipotesis,

bahkan tesis, telah sekian banyak dimunculkan. Namun, mata rantai persoalan tersebut tak kunjung bisa diputus, bahkan bermunculan persoalan baru, seperti munculnya suatu virus yang senantiasa berevolusi menghadapi perkembangan teknologi antivirus.

Di antara akar persoalan yang bisa dilacak adalah kentalnya warna politik yang melatari konflik tersebut, yang akhirnya merembet ke konflik-konflik yang lain, seperti konflik ekonomi, sosial dan budaya. Sejak masa kolonial, etnis Tionghoa diperlakukan sedemikian rupa, sehingga sepertinya memang “dipaksa” berbeda dengan kaum pribumi. Kebijakan politik pemerintah kolonial yang lebih mengarahkan etnis Tionghoa ke arena percaturan ekonomi daripada politik atau pun budaya tampaknya terus mewaris ke periode berikutnya. Dan inilah tampaknya yang kemudian membawa kelompok etnis Tionghoa mengalami krisis integrasi keindonesian yang berkepanjangan.

Namun, kebijakan pemerintah kolonial dan pemerintah RI (baca: Orde Baru) yang menggiring para etnis Tionghoa ke lapangan bisnis dan sekaligus meminggirkan mereka secara politis tampaknya juga “bermata dua”. Pemberian ruang bisnis “secara diam-diam” bukan sesuatu yang tanpa maksud, tetapi lebih untuk memudahkan jalur kolusi sekaligus menjadi objek

pemerahan secara ekonomi. Dengan peminggiran mereka secara politis, berarti pula melemahkan posisi tawar mereka sehingga memudahkan pengkooptasiannya, termasuk kemungkinan untuk “dikorbankan” secara politis. Karena itu, tidak aneh kalau kemudian muncul pameo di masyarakat bahwa etnis Tionghoa sering dianggap “sapi perah” secara ekonomi dan “kambing hitam” secara politik.

Indonesia telah memasuki era reformasi. Demikian jargon yang sering diucapkan banyak pihak dengan lengsernya top penguasa Orde Baru, Soeharto, pada tahun 1998. Namun demikian,

Yang patut diketengahkan adalah perlu perubahan orientasi pendekatan integrasi etnis Tionghoa dari pendekatan politik ke pendekatan kebudayaan.

sudahkah orientasi kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa juga sudah mengalami perubahan ke yang lebih baik? Banyak pihak yang masih memandang skeptis akan

kemungkinan perubahan tersebut. Namun, di lain pihak, ada pula yang memandang secara optimistis, setidaknya ada perbaikan meskipun belum banyak. Di antaranya, dengan adanya pencabutan Ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang melarang penggunaan bahasa dan aksara Cina serta bentuk-bentuk ekspresi kebudayaan Cina lainnya.

Namun, terlepas dari semua itu, yang patut diketengahkan adalah perlu perubahan orientasi pendekatan integrasi etnis Tionghoa dari pendekatan politik ke pendekatan kebudayaan. Pendekatan politik hegemoni terbukti kemudian melahirkan identitas yang cenderung rasialistik, sementara pendekatan kebudayaan di banyak tempat terbukti lebih membawa pada kontinuitas historis yang berujung pada pelestarian dan kekhasan budaya tanpa disintegrasi. Kalau pun, seumpama pendekatan kebudayaan ini sudah dilakukan pada era pasca-1998, maka hal itu harus ditingkatkan lagi, sehingga terjadi transformasi kebudayaan secara signifikan. Dengan begitu, mata rantai permasalahan yang bersangkutan dengan etnis Tionghoa pelan-pelan bisa diputus untuk kemudian melahirkan suatu integrasi yang lebih dinamis, kreatif dan konstruktif. □

Mh. Zaelani Tammaka

PEMBAURAN CINA-JAWA

Sebuah Keniscayaan?

"Pendidikan multikultural sangat penting untuk diajarkan sejak dini, agar anak-anak akrab dan siap dengan segala bentuk perbedaan budaya maupun agama yang ada, yang kemudian bisa membangun rasa toleransi dan sikap penerimaan yang benar pada bentuk pluralisme dan multikulturalisme."

Dok. PSB-PS, Rif.

Peristiwa-peristiwa kekerasan kolektif berupa kerusuhan di kota-kota Indonesia termasuk di Surakarta sering kali menempatkan masyarakat etnis Cina sebagai korban utama. Contoh terakhir peristiwa kerusuhan hebat 14-15 Mei 1998 yang mengawali keruntuhan rezim Orde Baru. Di Jakarta, kerugian akibat kerusuhan yang terjadi mencapai Rp. 2,5 triliun, antara lain berupa 2.497 toko, 1.026 rumah, 383 kantor swasta, 45 perkantoran lain, 40 pusat perbelanjaan kecil, 13 pasar, 12 hotel, 24 restoran, 9 SPBU, 1.119 mobil, 821 sepeda motor, 1.188 orang tewas dan juga dikabarkan 468 perempuan Cina diperkosa. Sedangkan kerusuhan di Surakarta, kerugian yang dicapai adalah sekitar Rp. 457,5 miliar dengan rincian kerusakan; 307 bangunan yang terdiri dari pertokoan, plasa, show-room, perkantoran, bank, hotel, restoran dll, 261 mobil dan 400 sepeda motor rusak, juga 39 orang tewas kebanyakan akibat terjebak dalam kebakaran.

Dari semua kerusakan itu, mayoritas adalah milik masyarakat etnis Cina. Kenapa warga Cina selalu menjadi korban? Kenapa sejarah amuk massa terhadap mereka selalu berulang? Khusus di Solo, amuk massa yang melibatkan etnis Cina sejak **"Geger Pecinan di Kartosuro"** yang mengawali lahirnya Kota Solo hingga saat ini tercatat sejumlah 17 kali, sebuah rekor yang memprihatinkan.

Demikianlah, proporsi yang tidak seimbang telah menorehkan sejarah disintegrasi, stereotip yang semakin memperjelas garis perbedaan antara warga pribumi (Jawa) dan nonpri (Cina). Ironisnya, keduanya adalah warga negara Indonesia. Kerusuhan anti-Cina yang melanda pada dasarnya adalah manifestasi ketidaksenangan pada orang-orang Cina sebagai akibat persaingan ekonomi yang tak setara. Nonpri kemudian identik dengan kekuasaan yang serakah dan menyengsarakan rakyat. Sementara warga pribumi identik sebagai

Ketika *mindset* sosial tentang warga Cina telah terbentuk, sebesar apapun keinginan etnis Cina untuk menyatu dengan masyarakat pribumi, mereka telah terjebak pada proporsi nilai yang tidak seimbang dari masyarakat.

rakyat yang menerima kesengsaraan. Sering kali sentimen anti-Cina tersebut dimanipulasikan dalam bentuk tekanan politik, tindak kekerasan, atau diskriminasi yang dikemas dalam bentuk nasionalisme ekonomi atau program pribumisasi.

Persoalan ini semakin menajam ketika *mindset* sosial tentang warga Cina telah terbentuk. Sebesar apapun keinginan etnis Cina untuk menyatu dengan masyarakat pribumi, mereka telah terjebak pada proporsi nilai yang tidak seimbang dari masyarakat. Aturan dalam pemerintahan yang dengan jelas membedakan posisi pribumi dan nonpribumi telah membuat kerangka pikir bahwa pribumi lebih nasionalis dari pada nonpribumi. Belum lagi permasalahan perkawinan campur dengan etnis Cina yang banyak dipersoalkan karena menyalahi norma masyarakat khususnya Jawa, namun tidak begitu

dipersoalkan ketika perkawinan campur tersebut dilakukan dengan warga etnis Arab atau etnis yang lain. Sentimen ini bahkan terus berlanjut dalam sebuah sistem kepercayaan (baca: agama). Masyarakat etnis Cina terus *diembel-embeli* sebagai “etnis Cina” ketika terdapat penyebutan agama.

Seperti: Islam Etnis Cina. Namun hal ini tidak terjadi pada etnis Jawa, Kalimantan, Arab atau etnis lainnya. Lalu bagaimana dengan munculnya makna pejoratif pada penyebutan “Cina” bagi sebagian masyarakat, yang cenderung bermakna emosional, menghina atau memaki-maki pada masyarakat etnis Cina?

Sedikit uraian di atas, banyak memunculkan pertanyaan, kenapa masyarakat etnis Cina lebih banyak mengalami sentimen dari kehidupan sosial di Indonesia? Apa yang terjadi antara etnis-etnis tersebut? Apa yang melatarbelakanginya? Bagaimana duduk perkaranya? Sebenarnya bagaimana *sih* hidup keseharian etnis Cina?

Dari sini,
Buletin *Kalimatun*

Sawa' berusaha kembali mengkaji dan menggagas konsep integrasi sosial masyarakat, terutama pada etnis Cina, yang berdaya besar untuk menangkal terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang mengorbankan sebuah keindahan integrasi dari bangsa Indonesia.

Sepenggal Kisah Hidup Warga Etnis Cina

Sebut saja Mami, wanita berumur dengan perawakan sedang dan jelas sekali memiliki guratan wajah Cina. Mami tinggal di daerah Danukusuman Surakarta. Sejak belia, menikah dengan Papi waktu umur 20 tahun. Kini dia sudah berusia 52 tahun. Mami sendiri telah memiliki 3 orang anak yang kesemuanya perempuan dan seorang cucu.

Pada saat kerusuhan 1998 Mami merasakan imbas yang besar dengan hilangnya hampir seluruh barang dagangan miliknya. Mami yang telah membuka toko kelontong sejak menikah, merasakan kerasnya

Mami berkata, “Ketika terjadi kerusuhan Mei 1998 itu, saya dan keluarga hampir kehilangan seluruh harta benda. Meskipun tidak bernilai banyak namun harta tersebut adalah hasil kerja keras saya bertahun-tahun.”

“Agaknya tidak mungkin bagi kami untuk menjadi PNS, apalagi masuk. Mendaftar pun rasanya kami sudah tidak memenuhi syarat.”

kehidupan sebagai warga keturunan. Namun dia yakin bahwa Tuhan berkuasa akan semuanya. Ketika kerusuhan tersebut terjadi, Mami selalu mengembalikan semuanya pada Tuhan YME. Karena menurutnya, semua cobaan adalah sebuah bentuk kasih Tuhan pada hambanya.

Mami berkata, “Ketika terjadi kerusuhan Mei 1998 itu, saya dan keluarga hampir kehilangan seluruh harta benda. Meskipun tidak bernilai banyak namun harta tersebut adalah hasil kerja keras saya bertahun-tahun. “Sejak kejadian tersebut, Mami tidak dapat membuka toko lagi, karena tidak memiliki modal satu rupiah pun. Keluarga Mami pun sampai harus mengungsi ke tempat tetangga, bahkan mereka harus minta tetangga ketika tidak memiliki makanan. Hal itu terjadi hingga berbulan-bulan lamanya. Mami mengakui bahwa mereka yang melakukan penjarahan dan perusakan tahun 1998 itu

memang dari etnis Jawa, namun Mami berpendapat bukan berarti orang Jawa adalah jahat. Mereka yang melakukan penjarahan adalah mereka yang jahat, jadi bukan Jawa atau Islam atau Kristen atau etnis apa yang jahat, namun perilaku orangnya yang jahat.

Untuk mengembalikan kondisi toko, Mami mendapatkan bantuan dari sahabat sahabatnya dan dari pihak gereja. Sedangkan dari masyarakat etnis Jawa, Mami mengaku tidak mendapatkan bantuan berupa uang, kecuali dari nenek tetangganya yang setiap hari memberikan tempat untuk tinggal dan menumpang makan. Di dalam hatinya Mami masih merasakan takut dan ngeri dengan kejadian 1998 dan berharap agar semua warga bisa bersatu dan saling melindungi satu-sama lain.

Berkenaan dengan masalah birokrasi pemerintah, Mami tidak merasakan satu bentuk diskriminasi yang berarti, meskipun hingga sekarang Mami masih harus memegang surat SKBRI, tapi surat tersebut hampir tidak pernah ditanyakan ketika Mami mengurus KTP ataupun ketika menggunakan haknya pada pemilu lalu. Dan anak-anak Mami pun sudah tidak

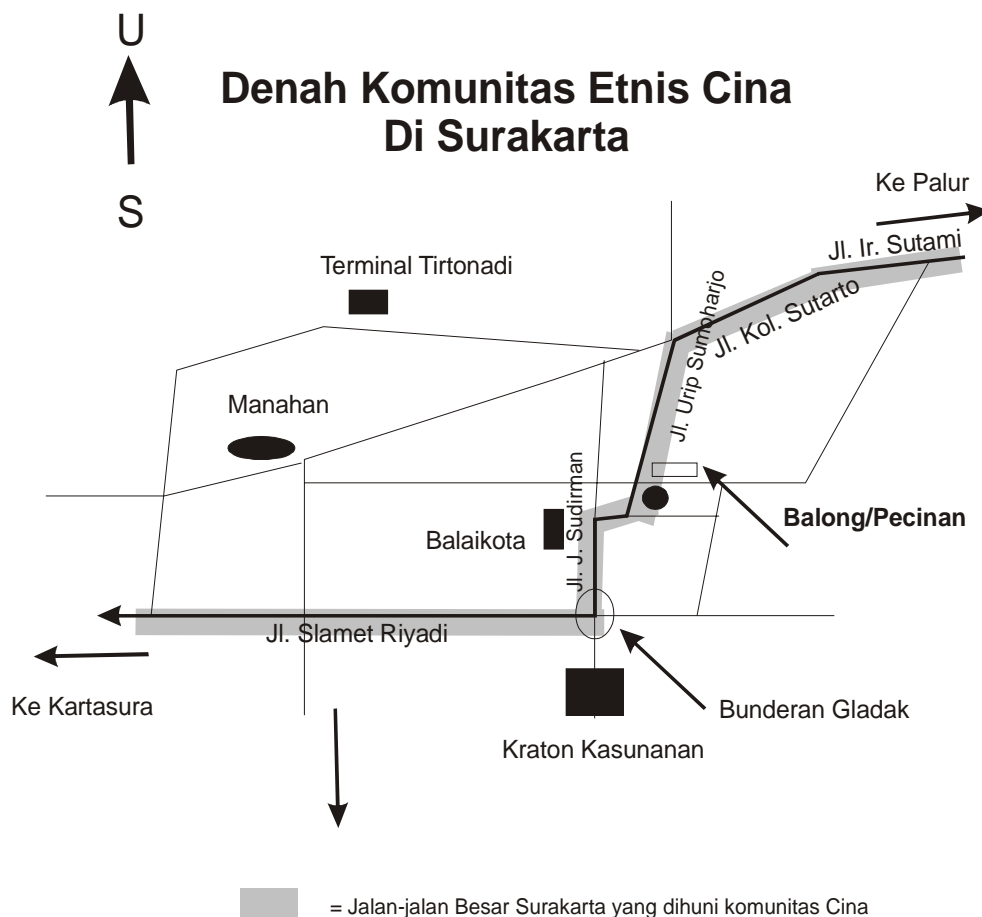
memiliki surat tersebut.

Mami mengaku tidak pernah merayakan imlek. Malahan, Mami sering memasak ketika lebaran tiba dan merayakannya bersama semua keluarga Mami yang berkumpul di rumah. Anak-anak Mami yang kecil pun sering ikut keliling bersilaturahmi ke tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Mami merasakan keharmonisan tersebut sebenarnya dapat dibina dengan baik. Dahulu ketika suami Mami masih menjadi pengurus kampung, Mami sering mengikuti halal bi halal di kampung Danukusuman dan tidak merasakan diskriminasi dari masyarakat. Malah sang mubaligh sering menjelaskan tentang ayat di Qur’an yang menerangkan soal



silaturahmi dan menuntun umat beragama lain untuk mencocokkan dengan apa yang dituliskan di Injil.

Perlakuan diskriminatif, memang tidak hanya dialami oleh Mami dan keluarganya, namun orangtua Mami, dahulu sering



merasakannya, sampai satu kali pernah orangtua Mami diperlakukan kasar oleh orang etnis Jawa, yakni pernah wajahnya dilumuri kotoran jelaga. Namun itu cerita ketika Mami masih kecil. Kalau sekarang Mami dan anak-anaknya tidak pernah mengalaminya.

Mami mengatakan bahwa kesempatan kerja dan berkarya di Indonesia untuk mereka warga keturunan Tionghoa, memang tidak seluas bagi mereka yang beretnis Jawa. Mami mengaku masih sangat sulit bagi anak keturunan, termasuk anak-anaknya, untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah instansi pemerintah, apalagi kesempatan

untuk menjadi PNS, adalah hal yang sangat mustahil. "Agaknya tidak mungkin bagi kami untuk menjadi PNS. Apalagi masuk, mendaftar pun rasanya kami sudah tidak memenuhi syarat. Akhirnya anak-anak saya pun saya suruh menjadi pedagang seperti saya saja, karena memang tidak mungkin bagi mereka bekerja di kantor. Kami ini miskin, tidak punya kedekatan dengan orang dalam, makanya sangat sulit. Apalagi kami warga keturunan." Namun, Mami tetap yakin dengan pedoman hidupnya; *ketika ia berbuat baik, maka orang juga akan berbuat baik padanya.*

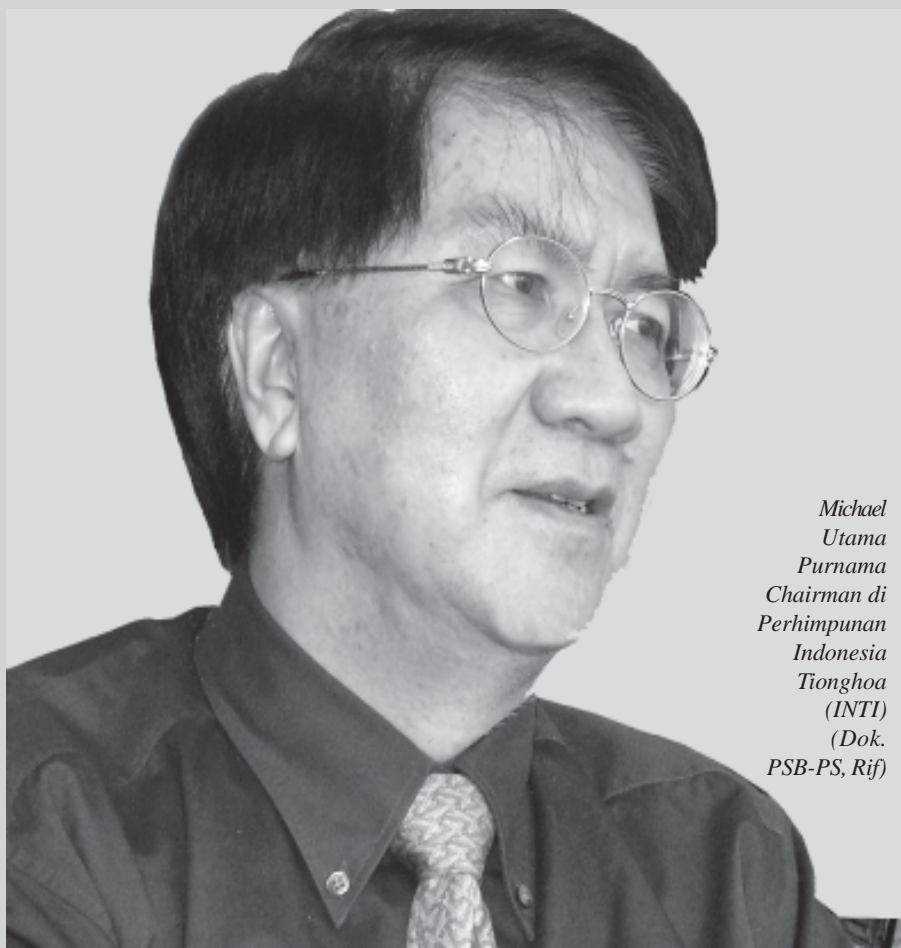
Kesulitan hidup seorang Mami memang wajar seperti

halnya orang miskin yang selalu mengalami kesusahan dalam hidupnya. Keluarga Mami tergolong sebagai warga etnis Cina yang miskin. Sama-sama miskinnya, keluarga Mbah Ompong —juga etnis Cina, menempuh hidup yang berbeda. Kalau keluarga Mami hidup miskin karena ditakdirkan miskin, tapi beda dengan pilihan hidup miskin yang ditempuh Mbah Ompong sekeluarga.

Mbah Ompong (44) beristrikan Menik (37) dan telah mempunyai anak bernama Bambang (15), hidup miskin, sederhana, dan kelihatan bersahaja di kampung Kepunton RT 04/ RW 03 Kalurahan Tegalharjo, Solo. Mbah

Ompong adalah seorang keturunan Cina. Lelaki berambut gondrong dan memelihara janggut yang masih terbilang muda ini giginya banyak yang ompong, oleh karena itu dijuluki dengan panggilan Mbah Ompong. Orangtuanya sebenarnya kaya tapi dia memilih hidup sederhana, tinggal di rumah kontrakan kecil bersama istrinya yang keturunan Jawa dan berasal dari keluarga miskin yang orangtuanya bekerja sebagai pedagang kaki lima dan berjualan masakan kare di depan Stasiun Peti Kemas Panggung, Jebres.

Mbah Ompong sendiri tidak bekerja, tapi hobinya sehari-hari adalah menanam dan memelihara



*Michael
Utama
Purnama
Chairman di
Perhimpunan
Indonesia
Tionghoa
(INTI)
(Dok.
PSB-PS, Rif)*

Pendidikan sebagai Upaya Integrasi Bangsa

Fakta saat ini bahwa kebanyakan warga etnis Tionghoa tidak bisa berbahasa Tionghoa lagi, di samping semakin besarnya jumlah mereka yang tidak lagi memeluk agama nenek moyang, tampaknya tidak bisa mengubah pandangan umum tentang perbedaan budaya antara warga

tanaman bonsai dan kadang-kadang tanaman bonsainya itu ia jual. Siang hari ia banyak duduk-duduk seharian di rumah sambil merokok dan kalau malam *ngobrol* bersama tetangganya di *cakruk* pos ronda sambil main kartu. Sedangkan Menik, kalau malam ikut bekerja membantu orangtuanya berjualan. Suatu saat pernah ditanya kenapa dia memilih hidup miskin daripada ikut bekerja dengan orangtuanya yang kaya, dia hanya tersenyum. Pilihan hidup miskin di kampung dan berbaur dengan warga keturunan Jawa sudah menjadi keputusannya. Mbah Ompong tergolong orang yang sederhana dan supel bergaul dengan seluruh

tetangganya yang keturunan Jawa. Hidup kesehariannya begitu unik, dan pilihannya untuk hidup miskin bagi seorang keturunan Cina kaya dan hidup berbaur dengan warga keturunan Jawa membuat decak kagum dan tanda tanya bagi orang Jawa tetangganya. Ternyata masih ada juga keturunan Cina yang memilih hidup miskin, sederhana dan tak canggung berbaur dengan tetangga.

Berbeda dengan Mami maupun Mbah Ompong yang miskin, sebut saja Budi Santosa (bukan nama sebenarnya juga warga etnis Cina) mengaku bahwa kebanyakan keturunan warga Cina lainnya yang kaya dan

tinggal di sepanjang tepi jalan-jalan besar Kota Solo mereka lebih suka hidup kaya dengan bekerja sebagai pedagang. Rumah-rumah mereka kebanyakan berpagar tembok dan tidak mau berbaur dengan warga keturunan Jawa. Rumah-rumah warga etnis Cina di kota Solo dapat dilihat dari arah timur ke barat menguasai jalan, baik di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan-jalan besar sejak dari Palur, Jalan Ir. Sutami (Kentingan Jebres), Jalan Urip Sumoharjo (Panggung-Pasar Gede), Jalan Sudirman (Gladak), dan Jalan Slamet Riyadi (Gladak-Kartosuro). Begitu pula di Jalan Coyudan yang berderet toko-toko emas milik Cina. Rumah-rumah



Pentingnya pendidikan bagi generasi mendatang bangsa. (Dok. PSB-PS, Rif)

etnis Tionghoa dan warga Indonesia lainnya. Kawin campur yang jumlahnya semakin banyak pun tampaknya masih tidak bisa menjembatani perbedaan budaya tersebut. Dengan kata lain, pandangan bahwa “kita beda” selalu dipertahankan dengan mengabaikan adanya perubahan waktu dan ruang, atau kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini

bisa berubah. Sebuah harapan tentang kehidupan bernegara yang adil tanpa diskriminasi pada etnis apa pun, tampaknya sudah mulai mengusik pribadi warga negara Indonesia. Menelusuri kemungkinan terwujudnya harapan tersebut **Rif’atul**

Khoiriyah kru *Kalimatun Sawa’* sengaja menemui Drs. Michael Utama Purnama seorang warga negara Indonesia yang memiliki darah keturunan Tionghoa, yang juga menjabat sebagai *Chairman* di Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).

“Saya adalah generasi keempat dari keluarga saya. Saya

sudah benar-benar tidak merasa menjadi orang Tionghoa. Saya tidak bisa berbahasa Tionghoa atau Mandarin sama sekali, *basa Jawa kulo saget. Ngoko kula saget, Krama Inggil saget, menawi kaliyan Ngarsa Dalem kula mboten wantun,*” aku Michael diselingi tawa mengawali pembicaraan.

Mengenai sentimen pada etnis Tionghoa yang berkembang di masyarakat Michael berpendapat bahwa hal ini tidak terlepas dari pengaruh historis tentang kebijakan kolonial dan pascakolonial yang mendorong munculnya persoalan pri dan nonpri. *Pertama*, kebijakan kependudukan kolonial Belanda yang membagi masyarakat menjadi tiga golongan rasial:



Jl. Coyudan, di mana berderet-deret toko-toko emas milik etnis Cina menguasai sepanjang kiri kanan jalan. (Dok. PSB-PS, Farid)

mereka yang besar-besar, mewah dan tertutup sebagian besar juga digunakan untuk berdagang di sepanjang tepi jalan-jalan besar Kota Solo. Kehidupan warga etnis Cina kaya terkesan tertutup dan eksklusif. Dengan mobil-mobil mewah mereka hidup sebagai kaum jetset yang suka *shopping* di mal-mal, mampir di restoran, kafe-kafe mewah (*the havers*) dan suka hiburan malam di diskotik-diskotik, namun kebanyakan mereka memilihnya ke luar negeri karena *saking* kayanya. Satu ciri khas pembeda bagi warga etnis Cina kaya dan miskin adalah yang kaya selalu bertempat tinggal di tepi-tepi jalan dan yang miskin lebih suka tinggal di dalam kampung berbaur

Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, dan lain-lain), dan pribumi — yang disertai pemisahan pola permukiman antara pribumi dengan orang Cina. Kebijakan ini memperkecil peluang interaksi badaniah dan sosialisasi kehidupan sehari-hari. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa agama mereka yang berlainan. *Kedua*, pelbagai deregulasi yang dilakukan pemerintah orde baru kemudian makin memberi peluang nonpri berkembang lebih besar lagi. Banyak di antara mereka menjadi konglomerat. Kesenjangan makin tegas. Belum lagi ditambah dengan berkembangnya stereotipe antara etnis Jawa dan Tionghoa yang merupakan bias dari kedua sebab sentimen di atas.

dengan warga Jawa.

Meretas Stereotip Buruk Relasi Budaya Jawa-Cina

Generasi muda adalah generasi penerus. Generasi muda adalah harapan bangsa. Generasi muda adalah penentu lembaran budaya masa mendatang. Sesuai dengan sucinya harapan anak negeri, relasi budaya Jawa-Cina mesti diperhatikan dan diperbaiki menjadi lebih baik. Khususnya bagi generasi muda mereka.

Berbicara generasi muda, pada umumnya pergaulan mereka sering diwarnai oleh semangat dan emosi yang membara. Konflik sering terjadi antara mereka.

Persoalan tentang stereotip ini jadi terus berkembang karena tidak adanya dialog dan komunikasi yang baik pada sebagian etnis Tionghoa dan etnis Jawa khususnya. Pembicaraan soal Cina-Jawa, miskin-kaya, masalah kelas juga harus diselesaikan, meski memang akan panjang prosesnya. Hal lain lagi adalah adanya asumsi bahwa rasisme itu tidak ada. “Rasisme tentu saja ada di mana-mana. Kaum pribumi punya persepsi orang Tionghoa tidak patriotik, eksklusif, dan sebagainya; Tionghoa punya persepsi pribumi terlalu



Begitu pula dengan pergaulan pemuda etnis Jawa dan etnis Cina. Sebut saja Lintang, seorang warga etnis Jawa siswa kelas II di SMP Bintang Laut Solo yang mayoritas siswanya terdiri dari warga etnis Cina. Berbicara tentang pergaulan pemuda antar etnis Jawa-Cina, Lintang menyatakan bahwa di sekolah pada dasarnya hampir tidak ada konflik atau tawuran antar mereka. Bisa dikatakan pergaulan mereka baik dan berjalan dengan aman.

santai. Stereotip ini selalu ada. Tentu persepsi ini harus kita ubah; tapi kita harus tahu stereotip etnis akan selalu ada antar suku. Hal tersebut tidak akan menjadi sebuah diskursus antar etnis manakala kita dapat mendekonstruksi pikiran kita bahwa semua bentuk stereotipe tersebut merupakan salah satu keunikan juga, asalkan hal tersebut tidak kemudian melahirkan sebuah kebencian,” jelas pria kelahiran Surabaya, 60 tahun lalu ini. Ditambahkan olehnya bahwa sebutan “Cina *elek*” sejak kecil sudah akrab dalam dirinya, namun Michael selalu menyikapi dengan santai dan terbuka. “Banyak teman-teman saya

Permasalahan perkelahian hingga tawuran, hampir tidak pernah terjadi di sekolah. Dijelaskan oleh Lintang bahwa permasalahan tawuran

biasanya terjadi jika seseorang dapat memprovokasi dan bisa terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan biasanya permasalahan yang terjadi, lebih karena persoalan pribadi seseorang yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan teman-teman sekolah. Lintang mengatakan ada keuntungan karena sekolahnya tidak berdekatan dengan sekolah lain, karena memang sangat rentan terjadi tawuran bila sekolah

mengatakan “Cina *elek*” dan semacamnya pada saya ketika berolok-olok, namun bagi saya itu merupakan salah satu bentuk kedekatan juga. Saya tidak langsung memandang bahwa itu merupakan satu bentuk pelecehan atau apa, kenyataannya saya Cina dan mungkin saat itu saya dipandang jelek. Saya pun sering mengatakan pada teman saya “Jawa *elek*”, Jawa *edan*” dan sebagainya sebagai ungkapan balasan dan itu bisa saya lakukan asal tidak dengan emosi.” Bagi Michael tradisi Jawa *pisuh-pisuhan* juga merupakan sebuah alat menjalin komunikasi kedekatan antara satu dengan yang lain, maka dengan penyikapan yang bijak, olok-olokan tersebut tidak berkembang menjadi bentuk

pelecehan atau pendiskreditan terhadap seseorang. Sesungguhnya istilah Keturunan Cina atau *Chinese descent* pun sekarang menjadi problematik bagi beberapa pihak karena bukankah warga Indonesia lainnya juga merupakan keturunan, keturunan Batak, keturunan Sunda, keturunan Ambon, dan sebagainya. Sekarang ada yang mulai memperkenalkan istilah warga negara Indonesia-Tionghoa yang dianggap cukup netral dan bisa diterima, paling tidak oleh warga etnis Tionghoa yang terpelajar, akan tetapi penggunaan istilah ini masih belum meluas kepada berbagai kalangan, termasuk media massa. “Problem konflik ini sebenarnya bukan pada apakah

dia Cina atau Jawa, melainkan pada *personnya*. Saya berkawan dengan banyak orang Muslim dari Muhammadiyah, NU atau dari ormas lain, tidak pernah ada masalah. Kita dapat saling membantu. Mereka orang-orang yang baik. Kalau ada yang beranggapan orang Islam itu teroris, bagi saya mereka yang teroris adalah yang telah membinasakan nyawa orang lain. Sama halnya dengan orang Cina, tidak semua Cina itu baik. Ada juga Tionghoa koruptor, dan kita juga membenci orang-orang seperti itu,” ujarnya tegas. Mengenai kebudayaan yang mengakar pada masing-masing etnis di Indonesia adalah sebuah anugerah yang menjadi keunikan negara kita. Bangsa Tionghoa



Suasana pulang sekolah siswa etnis Cina SMU Regina Pacis Surakarta pulang sekolah. (Dok. PSB-PS, Farid)

berdekatan dengan sekolah lain.

Permasalahan pergaulan antarsiswa dirasakan oleh Lintang. Sangat tidak mungkin percekocokan dan perkelahian muncul jika satu dengan lain pihak dapat saling menghormati

kebudayaan dan adat istiadat masing-masing. Saling menerima dan memaafkan atas perbedaan satu dengan yang lain harus diperkuat. Meskipun begitu, perasaan-perasaan tidak enak memang sering timbul akibat

perbedaan adat dan kebudayaan yang berkembang pada siswa etnis Jawa dan etnis Cina. Agaknya perbedaan etnis ini lebih terasa dari pada perbedaan keyakinan yang dipeluk. Bentuk prasangka sering timbul, meski akhirnya kedua belah pihak dapat menghilangkan dan memaklumi setiap perbuatan dan kesalahan yang diperbuat oleh masing-masing etnis.

Lintang merasa bahwa etnis Cina itu lebih memilih bergaul dengan sesama etnisnya. Dan sebaliknya, etnis Jawa juga lebih memilih untuk bergaul dengan etnis Jawa, karena lebih mudah dalam menjalin komunikasi dan lebih mudah bergaul dengan

mempunyai warisan kepribadian sebagai bangsa yang ulet, mengutamakan kejujuran dan kepercayaan, tidak mudah menyerah dalam arti jika seorang Tionghoa mengalami satu “kejatuhan” maka ia akan bangkit kembali. Sedangkan etnis Jawa sangat identik dengan keluhuran budaya dan filosofi Jawa “*andhap asomya*”. Nilai-nilai kepribadian tersebut dibangun dengan susah payah oleh nenek moyang, diharapkan penerusnya bisa berbuat yang sama. Degradasi moral yang saat ini terjadi membuat kita tidak lagi bisa mengidentikkan seseorang melalui latar belakang etnisnya saja. Seorang Tionghoa yang tidak lagi mempertahankan nilai kepribadian orang Tionghoa tentu saja tidak

orang Jawa tanpa harus sibuk menjelaskan dan merasa lebih nyaman karena tidak sering terjadi persinggungan. Sebab, etnis Cina sering menggunakan penamaan atau penyebutan yang orang Jawa tidak paham, seperti “*Cik*”, “*Koh*” “*Meimei*” dan semacamnya yang hanya berlaku di kalangan Cina sendiri. Begitu pula dengan etnis Cina yang lebih PD bila bergaul dengan sesamanya, merasa bebas dan tidak canggung. Lebih lanjut Lintang mengatakan kalangan etnis Cina yang secara ekonomi lebih kaya dibandingkan orang Jawa, sering dengan leluasa melontarkan kata-kata hinaan seperti “*miskin/kere*” dan

bisa disebut mewarisi tradisi Tionghoa. Menanggapi tentang problematika disintegrasi bangsa, Michael berpendapat bahwa problem tersebut tidak lepas dari pola pendidikan di negara ini. Michael Utama, yang sebelum terjun ke dunia bisnis lama berkecimpung di dunia pendidikan, menuturkan bahwa nilai pendidikan yang sarat akan

nilai nasionalisme, multikulturalisme sangat penting diterapkan di negara yang plural seperti Indonesia saat ini. “Pendidikan multikultural sangat penting untuk diajarkan sejak dini, agar anak-anak akrab dan siap dengan segala bentuk perbedaan budaya maupun agama yang ada, yang kemudian bisa membangun rasa toleransi dan sikap penerimaan yang benar pada



Kegiatan bakti sosial PMS Dok. PSB-PS, repro internet.ke kaum duafa. (Dok. PMS Solo)

semisalnya kepada orang Jawa. Etnis Cina juga terlalu “ceplasplos” (tidak dipikir dulu) dalam berbicara, yang kadang

menyinggung perasaan orang Jawa. Pada suatu kesempatan Lintang pernah berkunjung di rumah temannya yang Cina,

bentuk pluralisme dan multikulturalisme. Ketika ada penerapan Undang-Undang Sisdiknas, saya memprotes keras kebijakan tersebut dan saya katakan langsung pada Menteri Pendidikan Nasional waktu itu Malik Fajar, bahwa undang-undang tersebut malah akan menciptakan disintegrasi bangsa.

Saya pikir jika siswa belajar bersama dengan siswa yang lain agama, mereka akan dihadapkan pada sebuah realita perbedaan agama dan dengan itu mereka bisa melihat agama lain yang pada gilirannya nanti dapat menumbuhkan kesadaran akan identitas agamanya sendiri dan keimanannya, sehingga mereka dapat memunculkan sikap

toleransi yang benar terhadap agama yang lain,” jelas mantan Kepala Sekolah St Louis ini pada KS.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa integrasi etnis Jawa dan Tionghoa saat ini banyak mengalami kesulitan dikarenakan faktor sejarah zaman Orde Baru yang memposisikan etnis Tionghoa pada posisi minor, sehingga menciptakan eksklusivitas baik di kalangan etnis Tionghoa dan Jawa. “Ketika jaman kolonial kita dikelompokkan oleh Belanda berdasarkan kelas masyarakat,

lalu ketika jaman Soeharto etnis Tionghoa terjebak dengan adanya kuota. Orang Tionghoa yang tidak diterima di sekolah-sekolah pemerintah akan masuk di sekolah yang menerima mereka, sehingga terkesan etnis Tionghoa berkumpul dengan etnisnya sendiri. Hal inilah yang menimbulkan kesan eksklusif yang lambat laun menjadi sikap eksklusif dari beberapa etnis Tionghoa. Pada akibatnya bisa mempersulit pembauran di kalangan etnis Jawa dan Tionghoa. Sekali lagi lembaga pendidikan adalah sarana untuk menciptakan proses pembauran. Ketika saya di St Louis saya menemui Kakandep waktu itu dan mengatakan niat saya untuk mengadakan

Persoalan stereotipe buruk pembauran Jawa-Cina jadi terus berkembang karena tidak adanya dialog dan komunikasi yang baik. Pembicaraan soal Cina-Jawa, miskin-kaya, masalah kelas harus diselesaikan, meski memang akan panjang prosesnya

ternyata ia tidak *dimanggakke*(dipersilahkan masuk) oleh orang tuanya seperti halnya teman Lintang yang keturunan Cina.

Apa yang dirasakan oleh Lintang yang orang Jawa sama persis dengan apa yang dirasakan oleh sebut saja Lang seorang mahasiswa etnis Cina yang sekarang kuliah di Yogyakarta. Mereka berdua merasakan bahwa relasi antara Jawa-Cina ada yang “tidak beres” seperti perasaan canggung dan tidak ada kesatuan paham yang menurut mereka mesti diluruskan. Sejak kecil Lang memang

mempunyai perasaan berbeda dengan mereka yang etnis Jawa. Mengapa bisa demikian? Sejak kecil Lang mengaku dilarang orangtuanya bergaul dengan etnis Jawa karena Jawa itu jahat, dan kotor, nanti ia ketularan menjadi kasar, kotor, nakal dsb. Orang Jawa juga sering mengatai dia “Cina-Cina”, tapi dia merasa sebagai bukan orang Cina tapi orang Indonesia.

Setelah kuliah ia pun menyadari kehidupan orang Jawa itu ternyata berbeda dengan etnis Cina, orang Jawa itu terlalu santai dan jorok (mungkin orang sekarang bisa mengatakan udik). Pada

suatu saat ia pernah kesulitan dalam mengurus KTP karena diminta surat SKBRI yang dia sendiri tidak tahu surat apa itu. Tapi ternyata orang tersebut yang kebetulan etnis Jawa hanya minta uang. Petugas tersebut tidak mempermasalahkan lagi ketika diberi beberapa lembar rupiah. Sejak SMA ia merasa sebagai orang yang di jauhi oleh teman-temannya karena ia Cina. Teman-

pertukaran pelajar unggulan antara ST Louis dan SMU Negeri 1 di Surabaya dalam rangka menolak sistem kuota dan menciptakan pembauran di kalangan etnis Tionghoa dan Jawa. Namun hal itu tidak bisa terealisasi." Menurut Michael pembauran di Indonesia dapat terwujud jika semua pihak dapat berperan untuk mewujudkannya.

Segala perlakuan diskriminatif pada etnis tertentu haruslah dihapuskan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakatnya yang merasa terdiskriminasi harus mampu untuk menolaknya. Mantan Pimpinan PT Gudang Garam ini menegaskan, "Seperti halnya SKBRI, walaupun oleh pemerintah sudah dihapuskan, namun pada tataran pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang masih menuntut adanya surat tersebut. Masyarakat harus mampu untuk

menolaknya, jangan malah kemudian menjadikannya sebagai ladang korupsi pihak-pihak tersebut. Memang kita tidak mau repot tapi jangan malah menciptakan mental-mental koruptor itu berkembang."

Memperhatikan banyaknya perhimpunan warga Tionghoa bermunculan pasca Orde Baru Michael menyatakan bahwa banyak di antara etnis Tionghoa merasakan euphoria.

Diperbolehkannya warga keturunan etnis Tionghoa merayakan tradisinya bukan berarti membuat etnis Tionghoa berkurang hormatnya terhadap etnis yang lain. Etnis Tionghoa harus tetap menjaga hubungan dengan baik dan tidak mengeksklusifkan diri. "Banyak organisasi-organisasi tersebut yang sifatnya lebih Ke-Cinaan, oleh karena itu saya mendirikan INTI dengan maksud

menjadikannya sebagai payung bagi perhimpunan warga Tionghoa di daerah, supaya mereka lebih terorganisir. INTI sedang berusaha untuk memberikan pendidikan politik, Nasionalisme dan Sosial pada organisasi-organisasi perhimpunan Tionghoa lainnya, sehingga mereka bisa menyebarkan bentuk pendidikan Massa dan bisa membantu proses integrasi bangsa. Seperti halnya pendirian Pecinan, menurut saya adalah bentuk eksklusivitas, bentuk tersebut adalah sisa zaman Kolonial, tidak perlu diteruskan. Saya tidak tinggal di sana. Saya membaur dengan etnis yang lain di sekitar tempat tinggal saya. Boleh saja mempertahankan budaya, namun kalau tidak hati-hati dapat lebih melebarkan jarak masing-masing budaya Indonesia." □



temannya selalu memilih teman-teman Jawa, sehingga ia hanya punya sedikit teman, yaitu orang-orang Cina. Soal bahasa, Lang merasa berhak berbicara dengan kata-kata dalam bahasa Cina. Meskipun ia tidak tahu bahasa mandarin tapi ada beberapa sebutan yang ia bisa, sehingga ia sering menggunakan dengan teman-teman sesama Cinanya.

Kalau orang Jawa boleh berkata dengan bahasa Jawa *medhoknya* mengapa orang Cina tidak boleh? Mengenai sebutan "Cina", menurutnya sudah tidak menjadi masalah, sebab memang ia mewarisi darah Cina, walau demikian ia adalah warga negara Indonesia. Berkenaan dengan tradisi Imlek, di keluarganya tidak begitu dirayakan. Paling

sekeluarga merayakan jika ada undangan menghadiri acara perayaan. Lang tidak mengetahui makna Imlek. Ia merayakan karena ikut-ikutan.

Apa yang telah tergambar dari ungkapan-ungkapan di atas menyisakan agenda masalah integrasi bangsa yang belum optimal, khususnya bagi relasi budaya Jawa-Cina. . □

PASANG SURUT INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT ETNIS CINA DI SURAKARTA

Berangkat dari kegelisahan komunitas sosial masyarakat Surakarta yang terangkat dalam forum–forum, dialog dan diskusi intersubjektif, agenda permasalahannya senantiasa menempatkan persoalan konflik perkotaan di Solo yang bersifat laten dan endemik. Wacana dialog dilandasi ketidakpercayaan dan ketidakniscayaan, bahwa lembaran sejarah konflik di Solo menorehkan lembaran hitam, sampai kurang lebih 17 kali amuk massa. Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS ikut gelisah untuk mengangkat persoalan konflik yang berakar pada masalah laten pri vs nonpri diangkat dalam penerbitan Buletin *Kalimatun Sawa* edisi ke 4 tahun ini. Topik yang menarik adalah “Pasang Surut Integrasi Sosial Masyarakat Etnis Cina di Surakarta” Boleh jadi, topik ini sangat menarik untuk dikaji dari sisi sosiologis dengan menerapkan konsep integrasi sosial berdasarkan kepentingan ekonomi perdagangan di kota.

Dalam eskalasi yang panjang dan bersifat linier sejarah integrasi sosial masyarakat Cina di Solo senantiasa terikat pada kepentingan ekonomi perdagangan yang sangat eksklusif menciptakan pemukiman yang menyatu dengan basis perdagangan mereka, yaitu rumah dan toko (*ruko*). Potret sosial pemukiman masyarakat Cina di Solo, tidak ubahnya dengan komunitas etnis yang memiliki kepentingan perdagangan (*Madura–Sampangan, Bali–Kebalen, Arab–Pasar Kliwon, Cina–Pecinan, Banjarmasin–Banjar di Serengan, komunitas dagang Belanda di Loji Wetan, Komunitas Pedagang Batik Jawa di Laweyan*), juga bersifat eksklusif dalam potret segregasi sosial yang bersifat etnisitas. Sementara etnis Jawa lebih menampakkan pemukiman yang menyebar mengikuti alur stratifikasi sosial *wong cilik vs wong gedhe*, yaitu berada dalam konsep: *mbatur tapi lancur, mlincur golek pitutur*.

Mengamati kedudukan *wong cilik* di Kota Solo dalam struktur masyarakat feodal, potret pemukiman *wong cilik* pribumi Jawa menunjukkan fenomena pemukiman *ngindung, magersari, kuli kendho, kuli kenceng* dan *kuli gladhag*. Itulah potret sinkronik segregasi sosial *wong Solo* yang berada dalam fenomena pemukiman

eksklusif berdasarkan lintas etnis, bersifat pengelompokan pemukiman dagang dan terciptanya struktur sosial feodal yang tajam antara pemukiman *wong gedhe vs wong cilik*. Unsur-unsur konflik di kota akan meletus ketika terjadi *interest group* kalangan *entrepreneur* bergesekan secara politis dengan komunitas feodal dan kolonial.

Peradaban besar Sungai Bengawan Solo periode kuno di zaman Mataram Kartasura, orang Cina sudah bermukim dan meramaikan komunitas dagang.

Pasang Surut Integrasi Sosial Masyarakat Etnis Cina di Surakarta

Integrasi sosial orang Cina di Surakarta, di satu sisi memiliki ruang sejarah yang sangat kompleks dengan potret tipologi pemukimannya yang menunjukkan fenomena kampung dagang pecinan. Di sisi lain keberadaan orang Cina di Solo memiliki rentang panjang sejarah sosial ekonomi yang sangat tua dalam proses integrasi sosial mereka dengan kaum pribumi, hampir boleh dikatakan ekologi sungai

yang masih berfungsi sebagai jaringan transportasi perdagangan, mereka selalu mewarnai aktivitas perdagangan yang lintas etnis. Peradaban besar Sungai Bengawan Solo periode kuno di zaman Mataram Kartasura, orang Cina sudah bermukim dan meramaikan komunitas dagang di sana. Orang Jawa di pedalaman selatan Jawa Tengah karena sifatnya yang inklusif menepuk

dada sebagai golongan pribumi pada rentang Mataram Kartasura, tapi momentum sejarah "*Geger Pecinan Kartasura*", menunjukkan bahwa potret integrasi sosial Cina dengan pribumi Jawa sudah lekat dalam ikatan struktur sosial kelas menengah di Jawa. Gambaran ini setidaknya sudah diantisipasi oleh

sejarawan Belanda Wertheim dan D.H. Burger, sebagai menempati kelas menengah Jawa. Kesempatan mereka mengambil kelas menengah karena dalam struktur perfeodalan Jawa, agaknya hanya mengenal strata *wong gedhe vs wong cilik*. Filsafat sosial resmi ekonomi feodal Jawa hanya mengenal prinsip: "kekuasaan identik dengan kekayaan seseorang". Oleh sebab itu, sistem ekonomi-feodal pendapatan diukur berdasarkan besar kecilnya prinsip *apanage* yang diperoleh seorang penguasa

di pusat sampai di daerah. Besarnya kekuasaan akan diukur luas tanah pertanian *apanage* sebagai gaji imbalan jasa. Dengan demikian kekayaannya senantiasa bisa diukur sekaligus paralel dengan kekuasaan yang menyertainya.

Prinsip ekonomi perdagangan adalah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya dan prinsip ini menjadi simbol kekayaan sebagai simbol status sosial kelas menengah pedagang di Jawa. Di tengah struktur sosial resmi perfeodalan prinsip ekonomi *apanage* berseberangan dengan prinsip perdagangan, oleh sebab itu eksistensi kekayaan kaum pedagang senantiasa mengganggu ideologi kekuasaan kaum feodal yang tingkat ekonominya lebih rendah. Ujung-ujungnya integrasi sosial masyarakat feodal bertarung untuk melemahkan kedudukan kaum pedagang, sehingga ekologi pemukiman pedagang di kota harus dipinggirkan dalam batas wilayah administratif projo kejawen. Tanpa disadari pemukiman para pedagang mengelompok dalam potret eksklusif dalam kampung Laweyan di era Kartasura dan Kerajaan Pajang.

Sungguh menjadi polemik kesejarahan ketika kerajaan Mataram itu dipindahkan ke kawasan Solo. Polemik ini hampir paralel dengan *image* yang tercipta antara *land mark* kota dagang vs kota budaya (kerajaan) dan vs kota kolonial. Artefak Kota

Solo meninggalkan jejak-jejak sejarah yang kuat dari desain peninggalan lama sebagai kenangan kolektif *wong Solo*. Oleh sebab itu, polemik sejarah antara pembenaran *hardfact* (fakta keras) dan *soffact* (fakta lunak) harus ditegaskan kembali untuk menemukan otentisitas.

Menarik kembali interpretasi atas ekologi peradaban Bengawan Solo, fungsi yang paling benar untuk diinterpretasikan adalah munculnya jaringan transportasi Bengawan Solo untuk kepentingan perdagangan. Potret pemukiman kalangan pedagang senantiasa berada di bibir sungai. Komunitas dagang Laweyan tumbuh dalam kebesaran ekonomi lokal Jawa, karena pengaruh transportasi sungai Laweyan. Komunitas pedagang Arab di Pasar Kliwon memanfaatkan jaringan Sungai Kaliwingko dari arah Sukoharjo, komunitas pedagang Belanda dilengkapi beteng perdagangan Groote Modigheijd memanfaatkan ramainya pasar di tempuran Kali Pepe dan Kaliwingko di sekitar *Kreteg Gantung*, kemudian kampung pecinan Pasar Gedhe memanfaatkan bandar perdagangan Kali Pepe (sekarang gedung BNI'46) Balaikota, sementara itu pedagang Madura yang sekarang menempati Kampung Sampangan dahulunya bandar perdagangan Bengawan Semanggi. Para pedagang dari Bali yang bermukim di Kampung Kebalen adalah cikal bakal perkampungan dagang di sepanjang Tambak Segaran



Pasar Gedhe, salah satu sudut kota Solo. (Dok. PSB-PS, Farid)

menyusuri Kali Pepe yang menembus wilayah Mangkunegaran. Interaksi sosial mereka menempatkan relasi sosial dagang yang cukup harmonis seirama dengan lahirnya kerajaan dagang kuno Semanggi di bawah penguasa Joko Sengoro. Dalam berita-berita tertua yang dilansir oleh De Graaf, hubungan antara Kerajaan Semanggi dengan komunitas pedagang di sepanjang kali yang melintas Kota Solo (Kali Laweyan, Kaliwingko, Kali Bathangan-sekarang Jalan Slamet Riyadi, dan Kali Pepe, terjalin sangat harmonis, bahkan tidak terjadi berita konflik di antara kepentingan mereka. Tapi sejak geger pecinan Kartasura, keraton dipindah ke Solo menempati kawasan yang tersisa di Kedung Lumbu, (suatu kawasan rawa-rawa yang dipaksa menjadi situs keraton), maka ekologi sosial komunitas dagang di sekitarnya menjadi rusak. Hal ini disebabkan

karena perbedaan ideologi ekonomi antara budaya ekonomi feodal berhadapan dengan ekologi ekonomi komunitas pedagang, seperti dijelaskan di atas.

Lingkungan sosial kampung pecinan Pasar Gedhe terusik kepentingannya karena eksistensi Pasar Gedhe harus menjadi bagian dari tata ruang ekologi projo kejawen yang berorientasi pada prinsip kosmologi keraton. Apa sesungguhnya prinsip kosmologi keraton itu? Keraton yang dalam kajian ekologi tata ruang, ditempatkan sebagai *center* dari suatu kawasan, maka harus dilengkapi fungsi-fungsi tata ruang bangunan yang bersifat mistis legendaris. Dimulai dari pintu gerbang Kori Brojonolo, bangunan Jalan Supit Urang, bangunan Sitihinggil, Pagelaran, Alun-Alun, Masjid Agung, Gapura Pamurakan, Gapura Gladhag, garis poros lurus sampai Tugu Pamandangan Dalem (depan

balaikota) dan Pasar Gedhe, adalah syarat utama tata ruang keraton untuk melengkapi konsep mistis *projo kejawen*.

Relasi sosial kampung pecinan dalam interest perdagangan agak terganggu oleh keberadaan Pasar Gedhe yang dalam ekologi *projo kejawen* dikemas dalam disfungsi ekonomi. Ini adalah interpretasi sejarah atas munculnya ideologi konflik yang mewarnai kota Solo di awal munculnya budaya perkotaan, berupa konflik ide yang memposisikan eksistensi *land mark* kota dagang berhadapan dengan *land mark* kota budaya. Dalam dunia kehidupan interaksi sosial para pedagang yang potretnya lintas etnis, sebenarnya relasi sosial mereka yang mencerminkan kehidupan harmonis terjaga selama kepentingan ekonomi mereka tidak terganggu. Namun

potret pemukiman yang masing-masing kelompok pedagang yang bersifat lintas etnis, mencerminkan pencitraan kultur sebagai kaum migran, sehingga lahirlah varian ruko, rumah industri Laweyan, dan pemukiman etnis yang cukup eksklusif di mata pribumi Jawa. Agaknya potret ini juga menampilkan putusnya relasi sosial karena potret segregasi pemukiman yang memisahkan diri dari lingkup masyarakatnya. Ideologi konflik Kota Solo selain dipicu masalah pemukiman yang menampilkan segregasi sosial, agaknya juga dilengkapi oleh varian kecemburuan posisi pribumi Jawa yang tidak memperoleh tempat yang layak dalam tata ruang kota. Karena selama ini potret mereka dalam proses relasi sosial perkotaan senantiasa dialienasikan sebagai wacana fisik dan psikis. Dalam artian relasi

sosial pribumi hanya memperoleh haknya sebagai warga buruh kota, sementara kaum bangsawan dan orang kaya pedagang hampir dikategori sebagai tuan tanah dan tuan burger master. Kecemburuan sosial ini melahirkan melemahnya nilai-nilai interaksi sosial warga kota yang pada gilirannya akan membangun basis-basis pemukiman di pinggiran kota. Wacana kearifan lokal, potret segregasi sosial yang melahirkan kecemburuan sosial ini antara pribumi dan nonpri, hampir diibaratkan sebagai "*ngalah-ngalih-ngamuk-ngobong*", dari kalangan etnik keturunan muncul pameo mereka selalu dijadikan "kelinci percobaan, kambing hitam dan sapi perahan." Potret amuk massa pada siklus lima belas tahunan sekali dalam wacana sejarah konflik perkotaan di Solo, sesungguhnya menunjukkan bahwa interaksi sosial di antara masyarakat pedagang, bangsawan dan pribumi Jawa, hampir tidak terjadi interaksi sosial yang wajar. Karena diwarnai oleh kepentingan ideologi konflik dari masing-masing kelas sosial yang masih melekat dalam sejarah kolektif masyarakat kota. Oleh sebab itu, potret konflik selalu menunjukkan sasaran amuk massa yang ditujukan pada simbol kekayaan dari warga keturunan. Padahal ruko sebagai hunian dan alat perdagangan di Kota Solo tidak selamanya dimiliki oleh warga keturunan Cina.

Potret interaksi sosial dari kalangan kelas menengah di Kota



Amuk massa yang selalu mengorbankan etnis Cina. (Dok. PSB-PS)

Solo dalam dimensi kontemporer sekarang ini tidak lagi menunjukkan basis-basis pengelompokan etnis, melainkan menguasai jaringan jalan-jalan protokol dan strategis di kota. Dengan demikian, konflik berdasarkan segregasi sosial kaya-miskin dipicu ke arah lekatnya kecemburuan sosial perkotaan. Orang kaya hidup berdampingan dengan orang miskin disepanjang jalan strategis, padahal dalam bahasa sosiologis perkotaan mereka bersama-sama membutuhkan pengakuan hak sebagai warga kota. Ketidakpercayaan dalam faktor *security* lingkungan, maka rumah orang kaya umumnya dibangun seperti potret beteng kecil, sementara pemukiman kampung di tengah kota diwarnai bangunan portal di setiap gang-gang jalan. Dengan demikian, potret kehidupan orang kaya yang direpresentasi dari kalangan etnis keturunan, Tampaknya gagal membangun aksi integrasi sosial dengan lingkungannya, sementara warga miskin kota tetap pada sikap *prejudice* anti Cina karena penguasaan basis ekonomi kota. Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti PMS agaknya hanya wujud dari kamufase politik dalam aspek kultural saja. Karena eksistensinya juga hanya berwujud eksklusivitas anggotanya yang tetap

Kampung Mbalong (kampung pecinan) sebagai wujud simbol asimilasi Cina-Jawa, atau dalam bahasa lokal disebut keturunan "*ampyang*" yaitu kacang Cina gula Jawa.

mencerminkan sebagai lembaga segregasi budaya.

Simpulan

Kehidupan di Kota Solo hampir juga mencerminkan lahirnya kehidupan budaya perkotaan. Di akhir abad ke 19 bersambungan dengan awal abad ke 20, hampir disebut era tumbuhnya budaya perkotaan. Potret ini juga menunjukkan kecemburuan sosial karena munculnya dikotomi budaya kota dan desa. Dalam filsafah pandangan hidup masyarakat feodal Jawa dikotomi desa-kota hampir paralel dengan struktur sosial *wong gedhe vs wong cilik*. Di luar ekosistem itu juga lahir kelas menengah pedagang yang melahirkan pertumbuhan ekonomi kota untuk menggantikan sistem ekonomi *apanage*. Perseteruan di antara kelas-kelas sosial feodal dengan lahirnya kelas menengah pedagang yang pada gilirannya

melahirkan kecemburuan yang seimbang dengan potret segregasi sosial berdasarkan etnis. Gagalnya warga etnis keturunan Cina untuk membangun proses integrasi sosial, agaknya dijadikan alasan lahirnya kecemburuan kaya-miskin masyarakat yang paralel dengan struktur masyarakat feodal yang melahirkan tipologi *wong gedhe vs wong cilik*. Lebarnya komunitas kampung Bali menjadi Kebalen, komunitas

Madura menjadi Kampung Sampangan, komunitas Banjar menjadi Kampung Banjar Serengan, agaknya tidak diikuti secara diakronik sejarah sosial kalangan kampung pecinan di Pasar Gedhe sebagai usaha integrasi sosial. Memang muncul fenomena Kampung Mbalong sebagai wujud asimilasi Cina-Jawa, atau dalam bahasa lokal disebut keturunan "*ampyang*" yaitu kacang cina gula jawa, tapi fenomena sosial masyarakat Mbalong agaknya bukan hasil dari keinginan untuk warga keturunan Cina melakukan proses integrasi sosial. Dengan demikian maka hampir boleh dikatakan eksistensi warga keturunan etnis Cina di Solo bisa dikategorikan sebagai falsafah kehidupan di atas gabus mengapung di negeri seberang. □

*Dosen Jurusan Sejarah Fak. Sastra
Ketua Pusat Pengembangan
Budaya LPM UNS*

Moch Yamin*

SKBRI: Produk Hukum Peminoran Kaum Minoritas

Produk hukum tidak bisa lepas dari kondisi politik suatu negara. Jadi situasi politik yang tidak kondusif bagi demokrasi akan melahirkan produk hukum yang pada akhirnya bisa membelenggu hak-hak asasi suatu masyarakat. Termasuk dalam konteks SKBRI yang lahir dalam situasi ketika demokrasi masyarakat pada waktu itu belum dapat berjalan dengan baik dan masih ada pandangan bahwa etnis atau ras tertentu bisa dikhawatirkan atau ada kekhawatiran tertentu sebagai kekuatan politik atau ideologi tertentu.

Sejarah Hukum Diskriminasi di Indonesia

Seperti yang kita ketahui, sesudah tahun 1965, politik pemerintahan Soeharto terhadap orang Tionghoa kembali lagi seperti pada masa Kolonial. Kelompok orang Tionghoa diisolasi, dilarang masuk politik, dilakukan tekanan secara sosial misalnya penggantian nama Tionghoa, dan pelarangan budaya Tionghoa. Kelompok ini terikat pada penguasa. Politik pengawasan juga dilakukan pemerintah Orde Baru dengan cara menandai KTP warga Tionghoa, yaitu dengan pemberian spasi di depan nomor registrasi kartu. Selain itu setiap anak-anak warga Tionghoa yang akan mengurus surat-surat harus menyertakan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) beserta surat bukti ganti nama orangtuanya. Orde Baru juga mengharuskan orang Tionghoa untuk berbaur di segala bidang. Semua hal yang berbau Tiongkok dilarang seolah-olah Indonesia tidak pernah punya keragaman identitas sebagaimana dicantumkan



Dok. PSB-PS. wan.

dalam *Binneka Tunggal Ika*. Tapi seiring dengan itu pula penguasa secara sistematis melakukan pemisahan sosial dan isolasi kelompok masyarakat yang diidentifikasi sebagai "orang Cina".

Beberapa alasan yang digunakan Orde Baru dalam membatasi gerak: 1) Baperki sebagai organisasi etnis Cina dianggap ikut andil dalam penyebaran paham komunisme, sekalipun para anggotanya banyak yang tidak mengetahui pembelokan paham oleh para pengurusnya; 2) terbentuknya poros Jakarta-Peking pada masa Orde Lama; 3) kedutaan Besar Cina di Jakarta dianggap

ikut mendalangi Gerakan G 30 S/ PKI; 4) terdapat anggapan etnis Cina dari RRT (RRC) telah menyusup ke Indonesia untuk menyebarkan paham komunisme.

Dalam kaitan itu saya kira SKBRI muncul dalam konteks untuk membatasi atau mengakomodasi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, sehingga untuk etnis tertentu sekalipun ia lahir dan secara riil sudah menjadi warga negara Indonesia, tapi karena kita juga menganut paham *Yusanguinis* sehingga mereka yang keturunan Tionghoa tetap harus mempunyai SKBRI. Tapi dalam konteks sekarang hal tersebut sudah tidak relevan lagi, karena kekhawatiran seperti itu secara ideologi sudah tidak beralasan. Dan sudah seharusnya SKBRI dihapuskan.

Tinsley E Yarbrough, penulis buku *The Reliquist Court and the Constitution* mengemukakan bahwa pada kondisi tertentu pemerintah berkewajiban untuk menarik garis batas dalam perundang-undangan, membagi dan menggolong-golongkan orang-orang dalam kelompok-kelompok terpisah dan memperlakukan anggota kelompok tersebut berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Sejauh pemerintah mengatur kepentingan-kepentingan sosial mereka berdasarkan hukum yang sesuai dan mendasarkan pada sifatnya, pengkotakan tersebut bisa dipandang layak.

Prinsipnya saat tahun 1965 itu, semua warga negara

nonpribumi atau WNI keturunan baik itu dari etnis Arab, Eropa atau Tionghoa memang diwajibkan mempunyai SKBRI, tetapi untuk kelompok Tionghoa nampaknya memang diperlakukan khusus karena ditakutkan mereka membawa ideologi tertentu dan komunitas "mereka" akan dikontrol dan dibatasi secara ketat. Tampaknya SKBRI lebih diintensifkan untuk mereka yang

memperlakukan etnis keturunan Tionghoa lebih buruk atau minimal berbeda dengan etnis non pribumi yang lain, lantaran karakteristik yang mereka bawa sejak lahir atau pertimbangan lain yang nampaknya tidak berhubungan dengan maksud pemerintah yang semula ingin melindungi ideologi dan menjalankan kepentingan-kepentingan publik sesuai dengan landasan hukum yang dibuat,



*Tegakkan persamaan di dalam hukum bagi etnis Cina.
(Dok. PSB-PS. wan)*

berketurunan Tionghoa. Sedang untuk WNI keturunan yang lain tampaknya dianggap lebih tidak membahayakan dalam konteks ideologi politik mereka (baca: pemerintah orba). Jadi secara isi SKBRI sama sekali tidak mengandung stigma-stigma tertentu pada etnis Tionghoa khususnya, karena bentuknya adalah berupa manajemen atau kontrol terhadap WNI non pribumi. Namun ketika kebijakan-kebijakan tersebut mulai

maka yang kemudian berkembang adalah kecurigaan, prasangka dan asumsi stereotip tentang nilai dan perilaku etnis tertentu. Kebijakan SKBRI ini sendiri akhirnya menjadi satu kebijakan mengontrol dan membatasi ruang gerak etnis Tionghoa.

Rezim yang berkuasa saat itu telah membekap kekuatan rakyat untuk berjuang atas hak-haknya sehingga tidak ada perlawanan dari kaum minoritas karena semua tengah tiarap. Artinya dalam

situasi politik yang represif, otoriter dan militeristis semacam itu kelompok etnis Tionghoa tidak ada *bargaining* atau *power* untuk melawan itu sehingga mereka terima semua aturan tersebut walaupun sebagai suatu paksaan.

Pada pemerintahan Gus Dur (1999), SKBRI dihapuskan selain pertimbangan kesatuan bangsa, menurut pertimbangan hukum-pun hal pembatasan administratif semacam itu sudah tidak ada manfaatnya. Persoalan ideologi yang berkembang saat ini tidak akan selalu dijadikan sebagai ancaman ideologi Pancasila di Indonesia. *Pertama*, karena masyarakat sudah tidak lagi melihat bahwa ideologi semacam komunisme sebagai suatu ancaman. *Kedua*, dalam teknologi informasi dewasa ini wacana ideologi tidak bisa dibatasi dengan cara-cara administrasi pemerintahan semacam SKBRI karena orang semakin bebas mencari informasi di mana pun, dari siapa pun dan apa pun yang tidak bisa dibatasi melalui regulasi. Bagaimana pun upaya pembatasan melalui administrasi pemerintah semacam SKBRI sudah tidak efektif ketika bersaing dengan kebebasan teknologi internet dan sebagainya. Masyarakatpun kini bebas berideologi apapun asalkan bukan dengan maksud mengganti ideologi pemerintahan yang sah.

Dari segi hukum sekarang kita sudah tidak mengenal lagi diskriminasi antarwarga negara. Artinya, kita memang mengenal

WNA dan WNI namun tiada lagi WNI keturunan dari etnis tertentu yang kemudian mendapat perlakuan yang berbeda. Jadi, apabila seseorang secara *de facto* dan *de jure* sudah menjadi WNI maka tidak perlu ada persyaratan persyaratan tertentu dan perlakuan diskriminatif, baik dari segi administratif, pelayanan publik maupun juga dalam konteks perbedaan politik dan perlakuan sosial yang berbeda dengan WNI pribumi.

Disintegrasi (Dapat) Lahir dari Produk Hukum

Tergulingnya kekuasaan Orde Baru membuka kesempatan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi pada masyarakat kita. Pada masa pemerintahan Gus Dur SKBRI dihapuskan. Namun 32 tahun pelaksanaan pelanggaran hak-hak asasi manusia tersebut nampaknya menciptakan satu moralitas "ANTI ETNIS (Anti Cina atau Anti Pribumi)" yang berkembang pada masyarakat kita. Menurut Tinsley E. Yarbrough, *apabila suatu masyarakat dilegalisasi untuk melakukan diskriminasi terhadap sebuah kelas masyarakat maka apa yang bisa mencegah masyarakat tersebut untuk tidak mengerahkan kekuatan terhadap prasangka-prasangka yang lain?*

Perlakuan tidak layak yang dialami oleh etnis Tionghoa tidak hanya terdapat pada pembatasan secara administratif, namun juga pada akomodasi publik, pemukiman lapangan

pekerjaan, bahkan pendidikan. Pemerintah saat itu menyodorkan sistem kuota di mana hanya etnis Tionghoa memperoleh hak sangat sedikit untuk menempati sekolah-sekolah atau jabatan di pemerintahan. Hal ini adalah salah satu yang menimbulkan bentuk "balas dendam diskriminasi" inkonstitusional yang dilakukan oleh kalangan etnis Tionghoa pada warga pribumi. Ketika Etnis Tionghoa tidak mendapatkan haknya yang layak dalam kehidupannya, maka mereka pun dengan sengaja menerapkan perlakuan yang tidak layak pada warga pribumi yang kebetulan harus memiliki akses dengan mereka. Etnis Tionghoa pada akhirnya mengelompok dan saling memberikan fasilitas yang lebih baik dengan sesamanya sementara mereka mendiskriminasi etnis lain sebagai bentuk balas dendam. Bom "dendam" itu terkubur rapi di bawah kulit pembauran dan meledak di tahun 1998.

Ketika pemerintahan secara luas berhasil memastikan adanya perlakuan adil terhadap semua warga dan mengira mereka berhasil mempercepat terciptanya masyarakat yang terintegrasi secara utuh, mereka melupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar pemulihan. Apakah kebijakan antidiskriminatif tersebut hanya mengikat bagi para pejabat saja atau sudah meluas ke semua warga dan institusi? Jika memang demikian mengapa masih ada diskriminasi di daerah-daerah?

Apakah ketidaksetaraan di masa lalu kemudian menciptakan hak istimewa di masa sekarang?

Mestinya dalam pelaksanaan tidak ada keharusan SKBRI ini dalam level pelaksanapun di lapangan tidak perlu lagi ada perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok atau etnis tertentu. Baik dalam konteks pelayanan pemerintahan pelayanan publik dan secara sosial masyarakat pun harus menghilangkan *image* bahwa kelompok tertentu harus diperlakukan secara berbeda. Tapi tidak dalam konteks bagaimana menyelesaikan persoalan itu yang secara terintegrasi bahwa penyelesaian ini juga bukan semata-mata kontrol pemerintahan yang bisa menyebabkan represi tapi juga ada semacam regulasi yang sifatnya komperhensif di mana mereka masih bisa diakui hak hidupnya dengan diberi wilayah tertentu di mana kontrol pemerintah tetap berjalan dengan tidak mengkhawatirkan dari segi ideologi politiknya

Perlu Lahirkan Produk Hukum bagi Integrasi Bangsa?

Bisa dianggap bahwa disintegrasi bangsa ini adalah satu dampak dari politik hukum yang mengakibatkan diskriminasi pada etnis tertentu dan bisa dianggap ujungnya mengakibatkan disintegrasi. Namun persoalan disintegrasi bukan semata-mata karena persoalan penerapan hukum yang sifatnya diskriminatif.

Disintegrasi bangsa saat ini adalah karena sebuah kesadaran berbangsa pada masyarakat Indonesia yang memang mengalami suatu kemunduran. Bukan hanya pada warga etnis keturunan, namun pada masyarakat pribumi sendiri juga mengalami konflik horisontal yang menjurus pada suatu perpecahan. Kalaulah produk hukum memang menyebabkan disintegrasi bangsa, hal ini bukan berarti kecacatan dari produk hukum. Produk hukum bukan merupakan suatu kausa yang utama. Yang lebih dipertanyakan sekarang adalah kesadaran hidup berbangsa pada rakyat Indonesia

Semua produk perundang-undangan atau hukum apa pun tidak boleh mengandung satu diskriminasi pada etnis apa pun pada prinsipnya. Saya yakin dari segi undang-undang memang sudah tidak ada hal semacam itu. Namun pada implementasi manajemen administrasi pemerintahan, biasanya muncul distorsi, pembedaan semacam itu. Jika kita melihat UU HAM di Indonesia sudah tidak ada lagi bentuk diskriminatif dalam hukum. Hukum di Indonesia sudah "buta warna".

Hal itu tertulis juga pada Tap MPR mengenai kehidupan

berbangsa yang esensinya adalah untuk menegaskan kembali komitmen semua komponen bangsa ini akan perlunya nilai-nilai kebangsaan dan persatuan dan kesatuan. Namun saya kira instrumen hukum tidak menjadi satu obat mujarab yang bisa menyatukan atau mengukuhkan kembali integrasi kita sebagai suatu bangsa tapi yang lebih penting adalah adanya satu kebijakan dari segi politik, ekonomi

Semua produk perundang –
undangan atau hukum
apapun, pada prinsipnya
tidak boleh mengandung
satu diskriminasi pada etnis
apapun baik secara yuridis
maupun implementasi
prakteknya.

dan yang lain, yang tidak bersifat diskriminatif, tidak parsial dan tidak ada suatu perlakuan yang tidak adil sehingga mereka akan dengan secara sendirinya tumbuh kesadaran untuk berbangsa. Ini adalah satu bentuk kompleksitas, bukan hanya dari komponen hukum saja.

Stigma masyarakat sendiri di tingkat bawah belum mempunyai satu kesamaan kesadaran pikiran seperti halnya di kalangan elite tingkat pusat. Maka dari pemerintah mempunyai tanggung



Bintang-bintang olahraga bulutangkis bertebaran dari etnis Cina dalam Thomas Cup dan Uber Cup 1996. Sebuah sumbangsih yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. (Dok. PMS Solo)

jawab memberikan perubahan di tingkat birokrasi dan tidak boleh terjadi lagi hal semacam itu. Artinya, jika kebijakan SKBRI dihapuskan harus diikuti pada tingkat implementasi di bawah untuk juga mengubah, dan juga derivat-derivat SKBRI yang mungkin masih ada seperti pemberian kuota-kuota di lembaga pemerintahan, pengurusan KTP atau surat yang lain yang masih harus menyertakan lampiran-lampiran keterangan semacam SKBRI harus dihapuskan, sehingga tidak ada lagi perbedaan.

Dalam konteks kehidupan birokrasi yang sangat luas, memang belum sepenuhnya kehidupan birokrasi di daerah mengetahui itu. Karena ini juga

merupakan perubahan stigma sosial, jadi tidak bisa dirubah secepat itu meski sudah ada kebijakan yang baru.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1999, melalui UU No 29/1999, namun Indonesia belum menyusun UU antidiskriminasi rasial. Namun persoalan ini juga tidak akan begitu saja berhenti dengan disusunnya UU antidiskriminasi karena hal ini juga mengenai kultur nilai yang melekat pada masyarakat. Paling tidak melalui keputusan-keputusan hukum yang ada akan sedikit memperjelas hak-hak masing-masing sebagai warga negara Indonesia.

Tantangan Hukum pada Masyarakat Pluralis

Era otonomi daerah yang berlaku saat ini merupakan salah satu bentuk respirasi hukum untuk masyarakat Indonesia yang *pluriform* ini. Masyarakat saat ini mempunyai ruang yang lebih terbuka karena mereka bisa membuat produk hukum di tingkat yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakatnya, lebih mengakomodasi tuntutan sosial dan karakteristik masing-masing. Sesungguhnya ada sebuah ruang bagi hukum untuk mengakomodasi demokrasi sosial yang lebih sesuai dengan masyarakat. Artinya, hukum otonomi daerah boleh mengakomodasi bentuk-bentuk peraturan yang ada pada suatu



daerah, baik itu hukum adat yang berlaku pada etnis tertentu yang secara riil itu masih ada dan dihargai oleh warganya. Kebijakan Otoda membuka ruang bagi regulasi-regulasi di tingkat lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tapi hukum tertentu yang sifatnya nasional memang menjadi suatu keputusan yang sifatnya *unifikasi* dan itu standar. Untuk kehidupan yang sifatnya spesifik daerah, maka daerah boleh membuat produk hukum yang mencerminkan aturan yang sesuai sepanjang hukum itu tidak menegasikan etnis tertentu atau kelompok lainnya.

Pertanyaannya sekarang apakah otonomi daerah itu tidak

akan menimbulkan persoalan baru tentang disintegrasi bangsa, mengingat peraturan yang berbeda-beda di tingkat daerah? Dalam hal ini saya beranggapan bahwa persatuan bangsa tidak bisa hanya dimaknai dengan keseragamannya, termasuk dalam rezim hukumnya. Hukum yang sama bagi semua warga negara belum tentu bisa memperkuat atau mengakomodasi pelaksanaan persatuan bangsa. Justru hukum ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masing-

masing, tetapi masih dalam *frame* sistem hukum nasional. Hukum tidak harus diseragamkan untuk setiap orang atau masyarakat artinya seragam belum tentu bisa memperkuat persatuan. Nah, kalau kita siap dengan sistem demokrasi hal perbedaan tidak perlu ditakutkan, memang perlu proses namun setiap daerah bisa membuat hukum yang sesuai asal masih dalam konteks NKRI. Dalam unifikasi hukum masih ada pluralisme hukum.

Persoalan yang lebih besar sekarang adalah mengenai ketidaknetralan pelaksanaan hukum yang berpihak pada orang-orang tertentu dengan kepercayaan, ciri, bidang tertentu. Aturan hukum tidak boleh

semacam itu karena persyaratannya standar. Hukum atau peraturan memang tidak netral karena ditentukan oleh pelaksananya. Maka yang dinamakan independensi hukum, otonomi hukum itu memang tidak pernah ada, itu hanya utopia orang-orang dalam positivisme hukum. Secara empiris hukum tidak pernah objektif dan otonom karena dijalankan oleh pihak atau manusia yang cenderung memiliki keberpihakan atau subjektivitas yang tinggi. Susahnya, keputusan hukum akhirnya dijalankan oleh masyarakat yang pelaksana hukum. Sehebat apa pun standar aturan yang dibuat atau batas minimal boleh tidaknya suatu itu dilakukan hukum tidak akan bisa netral karena *role equipment*-nya pun berbeda-beda kecenderungan. Setiap pelaksana hukum boleh membuat diskresi atau kebijakan "eksepsi". Ruang diskresi yang dibuka terlalu luas akan menimbulkan penyimpangan. Jadi menurut saya, seminimal mungkin kita harus membuka ruang diskresi tersebut agar pelaksanaan hukum minimal dapat mendekati sebuah objektivitas.

Berbicara mengenai penerapan hukum di masyarakat, khususnya di Surakarta, kita sudah berhadapan dengan tataran hukum aturan yang sifatnya nondiskriminatif jadi hukum yang bersifat disintegrasi/konflik itu sudah tidak ada. Namun secara sosial, proses integrasi bangsa di Solo memang belum selesai. Gap

antar kelompok dan kecemburuan masih ada yang bisa menjadi *trigger*, dan jika hal semacam ini ada, maka potensi konflik itu akan selalu muncul. Termasuk jika perlakuan dari pemerintah daerah sering memunculkan hal semacam itu. Misalnya praktik KKN yang dilakukan oleh pejabat dengan pengusaha etnis tertentu atau melakukan prevelensi yang diberikan oleh kelompok-kelompok semacam itu yang mereka mampu membayar. Kasus-kasus semacam itulah yang sering memunculkan disintegrasi di tingkat lokal.

Permasalahan disintegrasi bangsa adalah mengenai kesadaran untuk berbangsa. Memaksa sekelompok orang untuk mengganti nama untuk

sebuah keseragaman tidak akan signifikan dalam menimbulkan integrasi bangsa. Karena itu saya kira proses akan terjadi dengan sendirinya akulturasi budaya itu akan berjalan secara alamiah. Kalau itu dipaksakan jadi semacam keharusan apa artinya penggantian nama jika ia tidak mengalami suatu perubahan nilai dalam dirinya. Kebijakan mengganti nama setahu saya bukan menjadi suatu yang imperatif. Tapi sekali lagi pada tingkat pelayanan akan lebih mendapatkan kemudahan ketika seseorang etnis Tionghoa mempunyai "kesadaran" bisa mengalami akulturasi budaya dengan masyarakat kita

sehingga mereka akan lebih bisa diterima. □

Artikel ini disusun berdasarkan wawancara Rif'atul Khoiriyah dengan Moh Yamin, S.H.,M.H.

Moh Yamin adalah dosen S1 dan program Magister Hukum UNS dan menjabat sebagai Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum di UNS. Dia juga staf pengajar di Fakultas Hukum UNIBA. Saat ini beliau juga aktif menulis mengenai Dampak Penerapan Hukum pada Kehidupan Sosial Masyarakat, Khususnya di Kota Surakarta.

Galeri Budaya



Tionghing sebuah Rumah Duka milik etnis Cina Solo di Jalan Kolonel Sutarto (Dok. PMS Solo)

M. Hari Mulyadi*

SEJARAH PERANAN DAN POTENSI MASYARAKAT ETNIS CINA DI SURAKARTA

Dinamika Kelembagaan Komunitas Etnis Cina

Proses integrasi sosial masyarakat etnis Cina, baik melalui individu maupun kelompok/organisasi sudah berlangsung lama. Bentuk integrasi tersebut semula dipengaruhi oleh kepentingan sebagai emigran yang berasal dari satu daerah, kemudian dipengaruhi pula oleh kepentingan para penguasa lokal atau kepentingan negara Kolonial. Salah satu organisasi Cina pertama di Jawa yang terkenal adalah "Tiong Hoa Hwee Koan" (THHK) yang didirikan pada tahun 1902 dan di tahun 1909 mendirikan organisasi kamar dagang "Shiang Hwee."

Setelah Dr. Sun Yat Sen melancarkan gerakan nasionalisme di Cina, Tiong Hoa Hwee Koan berubah menjadi organisasi politik. Organisasi ini banyak mengirimkan uang ke negeri leluhur yang pada waktu itu dalam proses bangkitnya nasionalisme dan perubahan politik di Cina. Dampak dari gerakan ini menimbulkan reaksi dari kalangan pribumi yang mayoritas Muslim, sehingga di Surakarta timbul bentrok fisik antara Kong Sing Jawa (*Rekso Roemekso*) yang didukung oleh Sarekat Islam dengan Kong Sing Cina *underbow* THHK.

Tahun 1920 didirikan "Chung Hua Hui" yang bertujuan memelihara nasionalisme Tiongkok. Di samping itu antara tahun 1920 - 1929 di kota Surakarta berdiri berbagai organisasi masyarakat etnis Cina, antara lain: 1. "Kong Tong Hoo", 2. "Hi Ang Gie Hwee", 3. "Hap Gie Hwee", 4. "Kong Sing

Hwee", 5. "Sam Ban Hien" dan 6. "Tiong Hoa Poen Sing Hwee".

Tetapi antar organisasi etnis Cina di Surakarta itu selalu berselisih adanya perbedaan pandangan mendasar, yaitu ada kelompok yang ingin tetap mempertahankan dan memelihara nasionalisme serta kebudayaan negeri Cina. Pandangan itu didasarkan kepada kedudukan mereka sebagai perantau. Kelompok lain menghendaki gerakan integrasi atau penyatuan dengan masyarakat pribumi. Pandangan ini didasarkan bahwa mereka merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Perbedaan antar kelompok itu dapat disatukan pada tanggal 1 April 1932 dengan dibentuknya organisasi Chuan Min Kung Hui. Bergerak di bidang kematian (*Begrafenisfonds*), diketuai oleh Tan Gwan Soei, pelindung dari organisasi ini dijabat oleh Mayor Be Kwat Koen.

Di masa Jepang, Chuan Min Kung Hui tidak leluasa bergerak, karena Jepang mendirikan organisasi sosial serupa yaitu "Solo Sokya Soksi" dan bertanggung jawab kepada pimpinan militer Jepang. Pada masa revolusi fisik 1945-1949 dilakukan reorganisasi "Hua Chiao Tsung Hui" yang dibentuk

Jepang menjadi Chung Hua Chung Hui sebagai penerus semangat Cina di Indonesia. Sedang di Kota Surakarta, Solo Soky Sokai dibubarkan sendiri oleh masyarakat etnis Cina Surakarta yang tergabung dalam Chuan Kung Min Hui.

Dengan bubarnya organisasi tersebut maka Chuan Kung Min Hui aktif kembali dan sebagai pusat kegiatan menempati Gedung Gajah di Sorogenen Surakarta. Dalam perkembangannya, pada tanggal 1 Oktober 1959, Chuan Min Kung Hui diganti namanya menjadi "Perkumpulan Masyarakat Surakarta" (PMS) dan masih berkembang hingga kini.

Pada tahun 1954, Siau Gi Tjan membentuk organisasi BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), awalnya bertujuan untuk menyatukan masyarakat etnis Cina dan menunjukkan kesetiaan/loyalitas kepada bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya organisasi ini memasuki wilayah politik dan sebagian pimpinannya ikut menyebarkan ajaran komunisme Cina. BAPERKI memiliki akses dan aktif berperan dalam hubungan antara pemerintah RI dengan RRC, yang salah satunya adalah pengiriman senjata RRC ke Indonesia. Akibat

peristiwa G30S/PKI, BAPERKI dibubarkan oleh pemerintah RI karena dituduh sebagai salah satu pendukung gerakan itu.

Geliat Masyarakat Etnis Cina di Surakarta Pasca Orba

Selama pemerintahan Orba, masyarakat etnis Cina dikucilkan dari kegiatan politik. Penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang berindikasi G30S/PKI termasuk tokoh, anggota dan simpatisan Baperki dan organisasi yang berbau etnis Cina lainnya, menimbulkan trauma yang berkepanjangan di kalangan mereka. Baperki dijadikan stigma dan momok bagi masyarakat etnis Cina agar menjauhi wilayah politik.

Dengan sistimatis dihancurkan identitas mereka antara lain mengganti sebutan Tionghoa dengan Cina, melarang perayaan agama, kepercayaan, adat istiadat dan budaya Cina

Baperki dijadikan stigma dan momok bagi masyarakat etnis Cina agar menjauhi wilayah politik. Dengan sistimatis identitas Cina dihancurkan: larangan perayaan agama, kepercayaan, adat istiadat dan budaya Cina secara terbuka, sekolah Cina ditutup, larangan penggunaan bahasa Cina dalam cetakan, penggunaan nama dan percakapan.

*Gedung Gajah sebagai sekretariat PMS.
(Dok. PMS)*



secara terbuka, sekolah-sekolah Cina ditutup, melarang penggunaan bahasa dan cetakan dalam bahasa Cina dan anjuran agar mengganti nama yang berbau Cina. Masyarakat etnis Cina hanya diberi ruang untuk melakukan bisnis semata. Kalaupun ada segelintir orang Cina yang terjun dalam dunia politik praktis, mereka hanya dijadikan bendahara atau mesin penghasil uang. Akibat politik selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orba, masyarakat etnis Cina seakan telah tercerabut dari akar budayanya.

Di bawah kepemimpinan AMK Wignyosaputro, PMS aktif dalam Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB) di

Surakarta. Bakom-PKB dibentuk 28 Oktober 1978 dan bertujuan menghilangkan ketegangan dan kepincangan di bidang ekonomi yang telah menimbulkan pelbagai letupan fisik dan garis pemisah antara kaya-miskin atau pribumi-nonpribumi. Kerjasama dilakukan antara Bakom-PKB Surakarta yang diketuai oleh Prasetyo Wahyudi dengan organisasi PMS melalui SK Dirjen Sospol No. 220.090/115, tanggal 14 Januari 1981. SK itu merupakan penugasan kepada kedua organisasi untuk mengadakan kegiatan kemasyarakatan terutama bidang sosial dan olah raga.

Reformasi 1998 juga membawa perubahan pada masyarakat etnis Cina, termasuk di Surakarta. Jika selama masa Orba hanya terdapat satu organisasi yaitu PMS, namun sejak akhir 1998 muncul kembali kelompok/organisasi masyarakat etnis Cina. Motivasinya mirip dengan yang terjadi di sepanjang tahun 1920-an, umumnya berbasis pada asal daerah leluhur dan komunitas pedagang Cina yang sama jenis komoditasnya.

Di samping itu sebagian etnis Cina yang dibesarkan di masa Orba, umumnya sudah jauh atau meninggalkan tradisi Cina karena dididik secara Kristiani. Mereka mulai terjun di partai politik, yaitu

tahun 1999 melalui PDI Perjuangan dan akhir tahun 2003 ikut mendirikan Partai Damai Sejahtera (PDS) di Surakarta. Seorang warga etnis Cina dari PDS maju sebagai Wakil Walikota mendampingi Slamet Suryanto mantan Walikota Surakarta dalam Pilkada 2005.

Potensi Masyarakat Etnis Cina di Surakarta

Kelompok/organisasi masyarakat etnis Cina yang muncul kembali pasca Orba banyak didorong naluri sebagai makhluk sosial, umumnya bersifat paguyuban atau kekerabatan, kegiatannya diutamakan untuk



berkumpul dan saling komunikasi sesama mereka. Namun kemunculannya juga banyak didorong oleh tokoh-tokoh Cina yang sukses atau kuat secara ekonomi. Kelompok atau organisasi seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang

sukses tersebut baik hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi dirinya atau untuk *bargaining position* dengan penguasa atau kekuatan lainnya.

Kelompok/organisasi tersebut umumnya juga melakukan kegiatan-kegiatan di bidang sosial yang cenderung karikatif, seringkali motifnya untuk mengamankan kepentingannya. Saat ini ada tiga kelompok/organisasi etnis Cina yang cukup besar di Surakarta dan beberapa kelompok etnis Cina yang kecil, dan ada yang bergabung di dalam kelompok besar.

Kelompok yang terbesar adalah Hokkian (Hoo Hap), semula wadah pedagang palawija/hasil bumi, di dalamnya juga bergabung kelompok Tio Ciu yang anggotanya pedagang/toko besi. Di masa lalu Hokkian memiliki beberapa gedung untuk kegiatan sosial, antara lain: gedung pertemuan Hoo Hap Hwee di Warung Pelem Jl. Urip Sumoharjo sekarang untuk SMP Negeri 13; SD Hua Kio (Hua Kong) Joyonegaran,

Kepatihan, sekarang untuk SMP Negeri 26; Sekolah Cina di Warung Miri Jl. RE Martadinata, sekarang untuk SMA Negeri 3 Surakarta. Seiring perkembangan kelompok ini selain mendominasi dagang hasil bumi/sembako, di masa Orba banyak yang



*Kampus UNS Mesen,
dulu SMP Giok Yong
Kong Hwee (Dok. PSB-
PS, Farid).*

membangun pabrik pengolahan makanan dan Obat-obatan. Sebagai pimpinan Hokkian sekarang ini Priyo (pabrik Mie Superior), tokohnya antara lain Junaidi (Konimex) dan alm. King Kong.

Kelompok Fujing (Hokjia) semula wadah bagi toko kain, dan hampir semua pedagang kain etnis Cina di Pasar Klewer. Dahulu kelompok Fujing juga memiliki gedung untuk pendidikan dan sosial, yaitu SMP Giok Yong Kong Hwee di Sin Min Mesen Jl. Urip Sumoharjo sekarang menjadi kampus UNS Mesen dan Asrama Kebalen di Jl. Sutarjo SH 16 sebelah barat Radio PTPN. Sejak Orba, kelompok ini menguasai banyak pabrik tekstil, antara lain Batik Keris (keluarga alm. Kwe Sam Tjok), PT. Sari Warna milik keluarga Budi Mulyono (Jie Cung) yang juga ketua PMS dan Fujing, dan H. Lukminto (Jie Sin) PT. Sritex. Anggota Fujing banyak pula yang

bergerak di dalam bisnis uang (kredit) atau perbankan.

Kelompok Hakka semula wadah bagi pedagang kelontong dan alat-alat rumah tangga. Dewasa ini Hakka dipimpin oleh Wen Lin pemilik toko Manis (peralatan rumah tangga) dan beberapa anggotanya menguasai bisnis ritel atau Toserba, antara lain Luwes Group.

Kelompok kecil etnis Cina lainnya: 1. Kelompok Hin Hua semula kelompok pengusaha becak dan toko sepeda, sekarang menguasai bisnis otomotif, motor dan mobil; 2. Hok Ciu semula kelompok pedagang emas; 3. Hong Fu semula kelompok pedagang meubeler; dan 4. Hope kelompok tukang gigi.

Etnis Cina berperan besar dalam roda ekonomi yang omset

di Surakarta tahun 2004/2005 sekitar Rp. 9 trilyun, dan mereka menguasai sedikitnya 60 %. Bagaimana mengintegrasikan potensi ini untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di Surakarta yang dewasa ini semakin melebar ? *Wa 'Ilah-u a'lam.* □

**) Direktur Akademi Teknik
Adiyasa Solo, mantan Direktur
LPTP Solo.*

Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS)



Menyuarakan Kebersamaan Multietnis dalam Nuansa Lokal

Kota Solo pada suatu pagi, ketika hampir semua penduduknya mulai menjalani kesibukannya masing-masing. Begitu juga seorang ibu-ibu paruh baya sebut saja Lasmi, yang tengah melangkah dengan lesu memasuki Gedung Gajah yang terletak di Jalan Juanda Surakarta. Dari kulit dan pakaian kebaya yang dikenakannya mencirikan betul bahwa dia adalah orang Jawa. Rupanya hari itu Lasmi sedang tidak menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Lasmi sedang tidak enak badan dan memeriksakan diri ke poliklinik yang berada di dalam gedung milik Perkumpulan Masyarakat Surakarta tersebut. “Ibu sakit apa? Kok

memeriksakan diri ke sini?” tanya reporter *Kalimatun Sawa’* setelah menyapanya. “Rematik saya kambuh Mbak. Ya.. dari pada jauh ke Rumah Sakit, di sini juga murah dan sama dokternya cocok. Dokternya Cina,” jawabnya. Pembicaraan terus berlanjut sampai kemudian Ibu Lasmi yang sehariannya berjualan itu menyatakan bagaimana pun ia lebih *sreg* diperiksa dengan dokter orang Jawa, agak kaku dan canggung diperiksa dengan dokter orang keturunan Tionghoa. Fenomena percakapan ini juga terjadi dengan penduduk Jalan Juanda yang merasakan betul beberapa manfaat dari organisasi Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS). Di satu sisi beliau

menyanjung aksi sosial dan even perayaan yang sering dilakukan PMS. Dia beranggapan bahwa masyarakat terutama kelas menengah ke bawah banyak terbantu oleh aksi-aksi sosial yang dilakukan organisasi yang telah berusia lebih dari 70 tahun itu. Namun dia juga menyatakan bahwa organisasi tersebut masih terkesan eksklusif dan tertutup, karena keanggotaannya yang hampir semuanya warga keturunan etnis Tionghoa dan cakupan kegiatannya kebanyakan berada di tingkat elit. "Kesan yang kemudian saya dapat adalah orang-orang etnis Tionghoa itu kaya dan kita orang Jawa itu miskin mbak, sehingga masyarakat Surakarta hanya

berharap dari pemberian masyarakat etnis Tionghoa."

Beginilah sedikit kilasan bagaimana masyarakat mensikapi keberadaan organisasi etnis Tionghoa di Surakarta. Tentu bukan menjadi rahasia lagi bahwa organisasi-organisasi yang berbasis etnis terutama Tionghoa harus bersusah payah untuk memperoleh tempatnya di masyarakat. Sejak beberapa tahun belakangan ini PMS (Perkumpulan Masyarakat Surakarta) yang cikal-bakalnya sudah berdiri sejak tahun 1932 ini, mulai menunjukkan eksistensinya pada publik Solo. PMS mulai menunjukkan

kiprahnya sebagai organisasi, khususnya keturunan warga Tionghoa yang bergerak di bidang sosial. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dan Solo khususnya telah berubah sedemikian rupa bentuknya menyusul runtuhnya rezim orde baru 7 tahun yang lalu.

Terbentuknya Perkumpulan Masyarakat Surakarta, sebenarnya merupakan sebuah hasil reinterpretasi konsep organisasi Chuan Min Kung Hui. Chuan Min Kung Hui sendiri sebenarnya adalah gabungan dari enam organisasi sosial yang kala itu memiliki ideologi yang sama yaitu nasionalisme terhadap bangsa Indonesia dan tetap melestarikan tradisi Tionghoa.



Sebuah Balai Pengobatan yang didirikan oleh PMS Solo untuk kesehatan masyarakat. (Dok. PMS Solo)

Dari sebuah pemikiran untuk menumbuhkembangkan rasa patriotisme dan kebangsaan Indonesia, serta pemantapan kegairahan berasimilasi dan peleburan warga etnis Tionghoa dan pribumi dalam organisasi, akhirnya lahirlah sebuah keputusan bahwa mulai tanggal 1 Oktober 1959, dibawah kepemimpinan Liem Thiam Bie, Perkumpulan Masyarakat Surakarta terbentuk menggantikan nama Chuan Min Kung Hui. PMS sendiri hingga kini masih menempati Gedung Gajah yang terletak di Jalan Juanda sebagai pusat aktivitasnya.

Aktivitas Organisasi

PMS, dalam pasang surut keadaan tidak menghentikan hasratnya sedetikpun untuk tetap melaksanakan visi dan misi perkumpulan. Hingga sekarang PMS masih bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan akan terus berusaha mempertahankannya. Mengusung sembilan panah dalam logo organisasi, PMS sejak awal berdirinya memiliki tujuan dan tekad untuk peduli, membantu melayani sembilan bidang sosial. Bidang-bidang tersebut adalah pelayanan seremonial, pelayanan kematian, pendidikan, perpustakaan, olahraga dan seni budaya, hukum dan akuntansi, poliklinik, balai pertemuan dan kantor organisasi.

Salah seorang pengurus

harian organisasi tersebut Sumartono Hadinoto menuturkan, bahwa telah menjadi tekad PMS untuk mengabdikan diri pada masyarakat lewat persaudaraan, persatuan dan kesatuan, tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, golongan dan status sosial. "Dengan disosialisasinya organisasi Perkumpulan Masyarakat Surakarta, sebenarnya merupakan sebuah komitmen bahwa organisasi ini adalah wadah untuk semua warga Surakarta yang peduli akan Solo. Organisasi ini bukan hanya wadah bagi etnis Tionghoa saja, namun kami juga bergerak untuk warga Surakarta yang multietnis, multiagama. Terbukti bahwa organisasi ini mempunyai kegiatan untuk melestarikan budaya

tradisional baik budaya tradisional Solo maupun budaya tradisional masyarakat Tionghoa. Jadi organisasi ini sudah lama membuka diri dan menjadi organisasi multietnis di Surakarta." Diturunkan oleh Sumartono bahwa sudah lama PMS memiliki keanggotaan pengurus bukan hanya dari etnis Tionghoa namun ada juga etnis yang lain seperti Batak dan Jawa. Selain itu PMS juga tidak memandang ciri keagamaan dari pengurusnya. "Ada pengurus yang beragama Islam, Kristiani dan Kong Hu Chu. Kita bekerja bersama-sama mewujudkan misi sosial dari PMS ini," tambah Direktur Candi ini pada *Kalimatun Sawa*'.

Kiprah PMS yang semula hanya berkonsentrasi dalam



Bakti Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh PMS Solo, sebuah kepedulian untuk masyarakat kecil. (Dok. PMS Solo)



Beberapa sudut pandang kantor PMS Solo yang baru. (Dok. PMS Solo)

bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang perayaan dan kematian, saat mulai berkembang terlibat dalam aspek budaya dan keagamaan. Secara rutin PMS sengaja menyatukan diri dengan masyarakat Solo pada momen-momen agama dan kebudayaan. Sebut saja momen mendekati hari raya Idul fitri, PMS telah mengaktifkan dirinya pada kegiatan bakti sosial untuk masyarakat yang tidak mampu. Tidak hanya itu PMS sengaja melibatkan penduduk Surakarta untuk merayakan bersama hari

raya Imlek yang diadakan setiap tahunnya. Pada kesempatan itu masyarakat Surakarta sengaja didekatkan dan diperkenalkan dengan budaya dari bangsa Tionghoa berupa atraksi Barongsai dan atraksi lainnya yang dekat dengan budaya Tionghoa. Kegiatan PMS tidak hanya berhenti pada momen-momen tersebut, namun secara rutin PMS mengadakan pelatihan kegiatan olahraga maupun kesenian di Gedung Gajah dan di kantor PMS berupa pelatihan wusu, senam jukung, musik cina dan musik

keroncong. Kegiatan ini terbuka untuk umum. Jadi, baik masyarakat keturunan etnis Tionghoa maupun pribumi dapat mengikuti latihan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Solo dapat lebih mengenal tradisi, baik tradisi dari masyarakat Jawa maupun tradisi bangsa Cina.

Sedang dalam bidang olahraga PMS memiliki Pusdiklat yang membina para atlet muda kota Surakarta supaya dapat bersaing pada kancah pertandingan yang lebih besar. Sebut saja olahraga bulu tangkis

yang sempat menorehkan prestasi untuk Indonesia. Pembinaan yang lain juga dilakukan untuk cabang oleh raga basket, catur, wusu dan beberapa olahraga lainnya yang sudah dapat memberikan sumbangsih kemenangan bagi kota Surakarta. "Terus-terang setelah kerusuhan Solo tahun 1998, citra Solo sebagai kota budaya seakan telah mati. Oleh karena itu dengan terus mencoba membangun manusia Solo dan memperkenalkan Solo di kalangan yang lebih luas, diharapkan citra Solo sebagai kota budaya akan kembali melekat pada kita," Tutur Sumartono dengan tegas.

Prestasi untuk Pembauran

PMS sebagai organisasi yang mengemban nama "Masyarakat Surakarta" selalu berusaha menunjukkan komitmennya dengan terus memunculkan ide

Untuk menghilangkan ketegangan dan kepincangan di bidang ekonomi yang telah menimbulkan berbagai letupan fisik dan garis pemisah antara kaya-miskin atau pri-non pri, diperlukan kesadaran semua manusia di Indonesia untuk mengatasi picu disintegrasi bangsa ini.

untuk menorehkan berbagai prestasi bagi Kota Surakarta. Pada tahun 1989 seni wayang orang PMS berhasil mendapat tropi bergilir dari Ibu Tien Suharto pada Festival Wayang Orang Amatir I. Prestasi ini terus-menerus diukir hingga pada tahun 1995 pada pelaksanaan Festival Wayang Amatir IV. Setelah pemerintah memperbolehkan etnis Tionghoa merayakan hari raya Imlek, PMS mencoba memanfaatkan momen

tersebut untuk kembali membawa nama Solo ke tingkat nasional. Yaitu dengan mencatatkan namanya di Musium Record Indonesia (MURI) dalam dua tahun berturut-turut. Tahun 2003 pada saat pembuatan kue keranjang Cap Go Meh terbesar dan tahun 2004 untuk Lontong Cap Go Meh Terbesar.

Selain mengukirkan prestasi, PMS juga menunjukkan rasa kepeduliannya bagi siswa berprestasi dengan memberikan beasiswa sebagai bentuk penyikapan program pendidikan nasional di Indonesia. Beasiswa ini diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan atas jalinan kerjasama dengan GNOTA.

Bergerak pada dua bidang yang wacananya sedang dalam perdebatan yaitu pembauran etnis, pada akhirnya membuat

Festival Wayang Amatir IV dilakukan oleh PMS Solo tahun 1995. (Dok. PMS Solo)

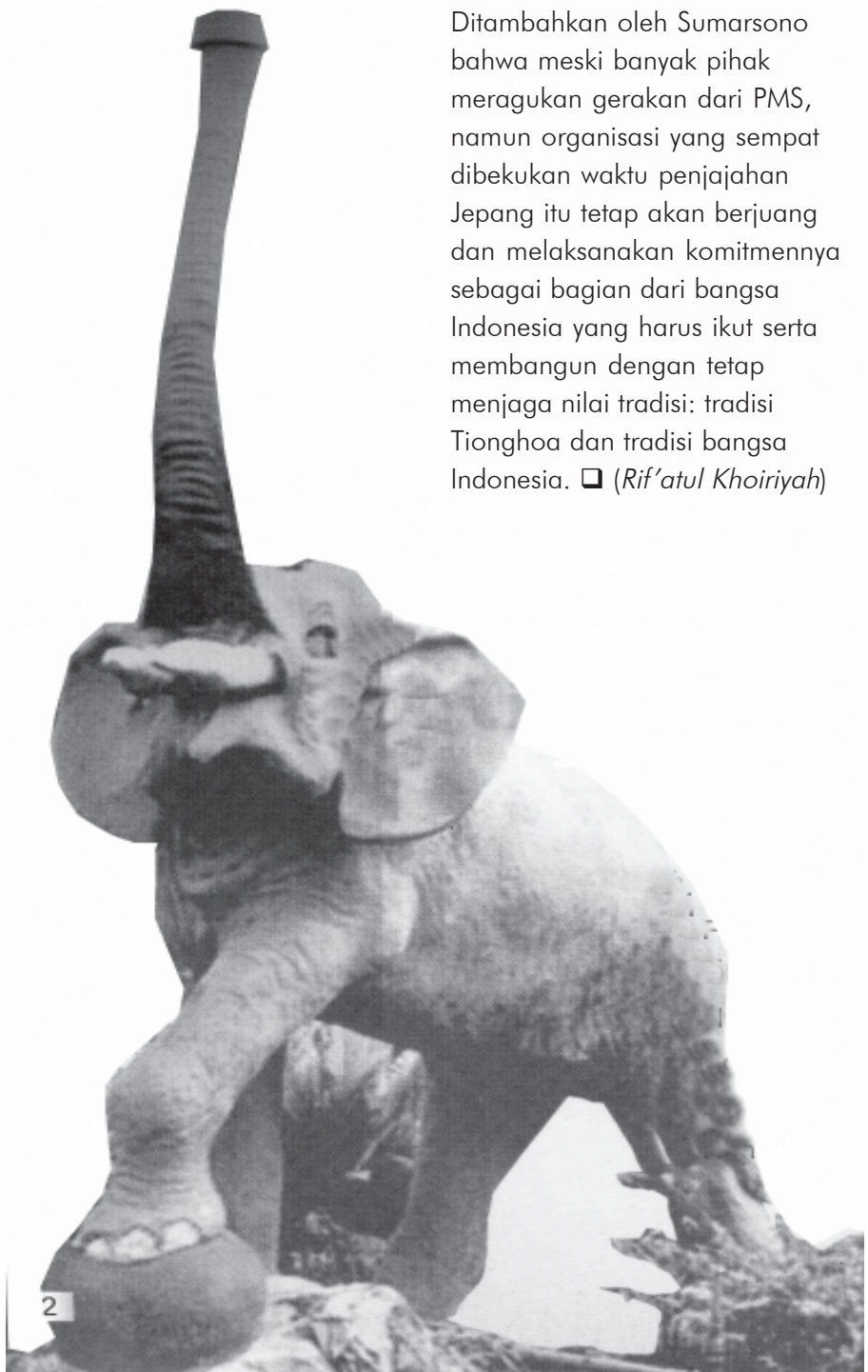


Paguyuban Masyarakat Surakarta harus memiliki kesadaran berorganisasi yang kuat sehingga keberadaannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Surakarta. Walaupun telah mengusung misi sosial kemasyarakatan bagi kota Solo, ternyata belum dapat melepaskan organisasi gabungan tersebut dari stereotip dan tuduhan buruk pihak-pihak tertentu. Kepada KS, Sumartono menjelaskan. Tuduhan bahwa PMS hanyalah semacam kamufase, eksklusivisme Cina dan mengincar kedudukan dalam politik Solo sering kali didapatkan dan dengan tegas PMS menolaknya. PMS sekali lagi adalah organisasi sosial kemasyarakatan untuk semua warga dan tidak akan menempatkan diri sebagai organisasi politik sampai kapan pun.

Menyadari potensi konflik yang sangat besar khususnya di Surakarta, PMS merasakan pentingnya sebuah pengkajian tentang kondisi masyarakat Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan PMS dalam pelaksanaan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa yang dibentuk tahun 1978. Badan ini bertujuan untuk menghilangkan ketegangan dan kepincangan di bidang ekonomi yang telah menimbulkan berbagai letupan fisik dan garis pemisah antara kaya-miskin atau pri-non pri. Langkah ini ternyata belum mampu membendung pergolakan bernuansa etnis yang meletus

akhir tahun 1980 dan tahun 1998. "Diperlukan kesadaran semua manusia di Indonesia untuk mengatasi permasalahan disintegrasi bangsa ini. Saat ini

kegiatan PMS memang lebih terkonsentrasi pada bidang sosial. Kami harapkan nantinya ada langkah untuk mencoba menggali dan memahami keadaan yang sebenarnya terjadi sehingga dapat kita wujudkan bersama persatuan kesatuan di Negara kita". Ditambahkan oleh Sumarsono bahwa meski banyak pihak meragukan gerakan dari PMS, namun organisasi yang sempat dibekukan waktu penjajahan Jepang itu tetap akan berjuang dan melaksanakan komitmennya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang harus ikut serta membangun dengan tetap menjaga nilai tradisi: tradisi Tionghoa dan tradisi bangsa Indonesia. □ (Rif'atul Khoiriyah)



Kebangkitan Islam adalah Kebangkitan Seluruh Ummat?

Melihat sejarah Islam, analogi atau *qiyas* telah menjadi prosedur yang primer untuk menerapkan hukum syara' pada kasus-kasus yang baru. Dalam analogi (*qiyas*), dibutuhkan adanya suatu ketentuan pokok yang bersifat terinci (*tafshili*) untuk dijadikan landasan mengaitkan sesuatu yang ada persamaannya, dalam hal tujuan dan sasaran ditetapkan ketentuan tersebut. Dalam bahasa teknisnya harus ada *ashl* dan harus ada '*illah*, untuk menghasilkan suatu hukum bagi kejadian baru. Berlahan tapi pasti akar muslim menyadari bahwa prosedur tersebut tidaklah cukup untuk menjembatani persoalan umat. Maka dicarilah hukum-hukum baru, teori-teori baru untuk sebuah kemaslahatan. Sebagian *ahl al-ijtihad* menganggap *qiyas* ini merupakan upaya final dalam penggalan dan penemuan hukum-hukum dari sumber syari'ah atau sumber yang dipersamakan (*ijma'*), tapi sebagian yang lain beranggapan, masih ada upaya penalaran yang lain seperti *istihsan*, *istislah* dan seterusnya. Namun semua itu haruslah berdasar pada sebuah sikap dari Muslim sendiri, persepsi yang arif, progresif dan cerdas tentang umat, sehingga kemaslahatan umat tidak lagi menjadi teori yang abstrak.

Perspektif ini seharusnya yang harus dipakai untuk memahami persoalan keumatan saat ini, sebagaimana yang secara menarik diperbincangkan dalam CMC yang diselenggarakan oleh Pusat Study Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) bekerjasama dengan Fakultas Agama Islam Desember 2004 lalu. Acara yang diadakan di ruang Program Pasca Sarjana UMS itu menghadirkan pembicara Prof. DR. Khalid Mas'ud dari Annama Muhammad Iqbal University Pakistan. Pengamat Sosial Politik Islam yang menguasai 7 bahasa asing ini dalam penjelasannya banyak menyoroti tentang konsep keumatan dan sikap muslim dalam menghadapi persoalan Islam kekinian. Pemahaman konsep "umat" telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman.

Fenomena runtuhnya rezim Saddam Husein tahun 2003 lalu dan invasi Amerika, yang hingga

saat ini entah sudah berapa ratus nyawa binasa karenanya, merupakan sebuah kenyataan lain selain bahwa Saddam telah membangun imperium raksasa di atas penderitaan rakyat Irak. Dan sebuah pengungkapan Invasi Amerika juga mendapat dukungan dari beberapa Negara Islam. Bukan juga sebuah rahasia bahwa saat ini negara-negara Islam telah diduduki dan dikuasai oleh politik negara Barat. Semua fenomena keumatan yang terjadi pada dekade akhir-abad 19 telah menguak beberapa fakta tentang rapuhnya kekuatan Islam saat ini. Islam yang diikrarkan sebagai “*rahmatan lil ‘alamin*” tidak lagi menjadi kekuatan sebagai pengayom dan pemersatu ummat. Salah satu sebab kemerosotan ini adalah lunturnya definisi keumatan yang dipahami oleh intelektual muslim saat ini.

Secara umum Khalid berpendapat bahwa fikih politik lahir pada era belakangan, sedangkan fikih-fikih lainnya telah berkembang pesat jauh sebelumnya. Barangkali citra negatif fikih politik disebabkan oleh tragedi politik yang terpisah dari etika keislaman dan aturan-aturan syara’, sehingga para fuqaha dan penguasa saling menjaga jarak. Demikianlah, keimanan telah melemah dalam aspek politik, sedangkan ambisi kekuasaan, gejolak fanatisme, dan konflik kekuatan makin



Fenomena keumatan pada dekade akhir-abad 19 menguak fakta tentang rapuhnya kekuatan Islam. Islam yang diikrarkan sebagai “*rahmatan lil ‘alamin*” tidak lagi menjadi kekuatan sebagai pengayom dan pemersatu ummat.

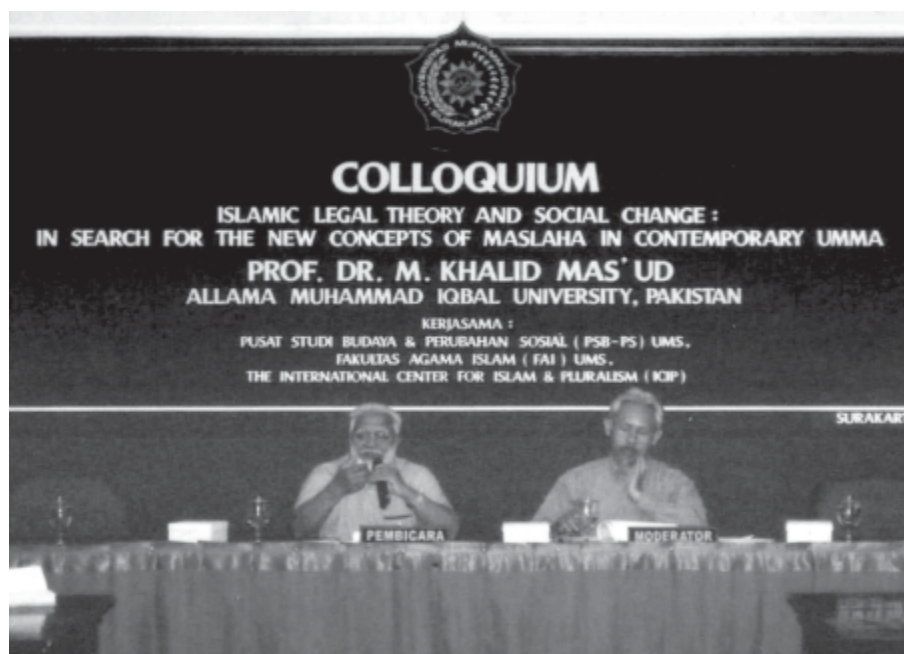
memuncak. Bila aktivitas kesyariahan dilakukan secara tertutup, maka ilmu pengetahuan pun menjadi tertutup. Ini mengakibatkan pakar politik tidak lagi memperhatikan hukum Islam dan kredibilitas para fuqaha dalam merumuskan permasalahan politik dan solusinya.

Seluruh dimensi fikih

mengalami stagnasi ketika muncul fenomena berdirinya bermacam-macam negara di kawasan Islam. Sedangkan fikih tetap saja — sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab tentang hukum kerajaan— berkutat dengan persoalan integrasi kepemimpinan negara, kecuali sebagian fuqaha yang berusaha memahami kemajemukan para pemimpin dan otentisitasnya berdasarkan keniscayaan berjauhannya kota-kota. Para fuqaha juga telah mengabaikan pemisahan yang terkadang terjadi antara sistem *imamah* dan *imarah* (kerajaan), padahal pemisahan tersebut berwatak agak sekular. Mereka pun mengabaikan berdirinya wilayah-wilayah yang mandiri secara *de facto*.

Al-Qur’an dan As-Sunnah mengemukakan masalah loyalitas dan tolong-menolong dalam ruang lingkup kenegaraan, sedangkan fikih mengedepankan problema-problema lokal berdasarkan pluralisme mazhab dan kaidah ‘ijma dan mempersoalkan

distribusi zakat dan hukum-hukum semacam itu. Para fuqaha merasa cukup dengan menjelajahi berbagai corak fikih yang berkembang antara yang khusus dan yang umum seiring dengan dominasi wilayah Islam yang belum mengenal batasan-batasan geografis. Mungkin cacat penyariahan kekuasaan



Colloquium, "Islamic Legal Theory and Change: In Search for The New Concepts of Maslahah in Contemporary Umma", diselenggarakan PSB-PS UMS.(Dok. PSB-PS)

merupakan penyebab para fuqaha mengabaikan realitas tersebut secara sengaja, sebagaimana mereka mengabaikan peran pemerintah dalam dasar-dasar hukum dan Al-Qur'an.

Kebangkitan kontemporer pada dasarnya mulai menggeluti masalah tersebut, tetapi belum optimal, meskipun persoalan umum dan khusus telah mencuat dalam kehidupan bernegara, bahkan dalam kenyataan langsung pada lingkungan politik tempat berkembangnya kebangkitan. Celaknya banyak kaum muslim yang berpegang pada Q.S. Ali Imron ayat 3, Islam adalah ummat terbaik tanpa bias membuat aplikasi seperti yang diharapkan.

Menurut Al-Imam Muhammad al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, ayat tersebut setidaknya menjelaskan dua hal. *Pertama*,

umat Islam telah tercatat di Singgasana Tuhan (*lauh al-mahfudz*) sebagai umat terbaik. Artinya, secara normatif, Tuhan telah memberikan rambu-rambu kepada setiap umat Islam agar melaksanakan perintah-Nya sebaik dan separipurna mungkin. Dan semestinya mereka tidak mengabaikan keistimewaan yang telah digariskan Tuhan tersebut.

Kedua, umat Islam diharapkan dapat membumikan ajaran keislaman dalam konteks kemanusiaan. Islam bukanlah ajaran yang keistimewaannya karena berasal dari Singgasana Tuhan, melainkan karena Islam adalah ajaran yang mampu berinteraksi dengan konteks kemanusiaan (*ukhrijat li al-nass*). Intinya, bahwa umat Islam dituntut agar mampu memahami ajaran keislaman sebaik mungkin untuk konteks kesejahteraan dan keadilan sosial.

Di sini, sebenarnya Islam sudah berbicara untuk konteks kemanusiaan. Untuk tujuan kemanusiaan tersebut, ayat di atas lalu menguraikan secara eksplisit bahwa peran yang mesti dimainkan oleh seorang muslim adalah menebarkan kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*), mencegah kejahatan (*al-nahy 'an al-munkar*) serta beriman kepada Tuhan (*al-iman bi Allah*).

Konsep umat terbaik tersebut telah banyak menggelitik peserta diskusi saat itu yang kemudian melahirkan tanggapan bahwa pengertian ayat tersebut adalah merupakan konsep mendalam bagi konsep keberagamaan, yaitu beragama dari konteks dan realitas kemanusiaan. Beragama dimulai dari nilai-nilai kemanusiaan sebelum menuju keberimanan. Sedangkan iman sebagai pesan utama dalam agama justeru menjadi terminal terakhir. Untuk menuju iman diperlukan sebuah proses yang menjamin tersebarnya kebaikan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, kemungkaran, terutama kejahatan yang berasal dari ketidakadilan harus bisa diantisipasi dan dicegah sedini mungkin. Di sini sebenarnya tersimpan prioritas keberagamaan untuk tujuan kemanusiaan. Apabila hal tersebut sudah bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, maka iman akan dengan mudah tertancap dalam diri setiap umat beragama.

Konsep umat terbaik (*khair ummah*), sebagaimana dijelaskan

ayat tersebut sesungguhnya ingin menegaskan hakikat Islam sebagai agama yang memelihara keseimbangan antara kemanusiaan dan ketuhanan. Islam adalah agama sejak awal diturunkan untuk membawa misi perubahan bagi manusia. Hanya saja yang menjadi soal adalah tatkala konsep “umat terbaik” tersebut dijadikan klaim kebenaran yang mewujud dalam pandangan eksklusif. Artinya, muncul kesadaran bahwa “saya adalah umat terbaik”, sedangkan umat lain “bukan umat terbaik”. Pandangan seperti ini seringkali dijadikan “teologi klaim kebenaran” yang merenggangkan persaudaraan dengan umat lain.

Menanggapi hal tersebut Khalid berpendapat bahwa perlu arti penting pemahaman yang bersifat progresif, bahwa konsep “umat terbaik” tersebut mesti diletakkan dalam konteks kemanusiaan, yaitu menebarkan kebaikan, keadilan, dan kedamaian; mencegah kejahatan dan konflik serta beriman kepada Tuhan, sehingga doktrin keagamaan dapat berfungsi sebagai doktrin pengukuhan atas keberislaman, tetapi juga mempunyai semangat pembebasan dan perubahan pada tataran empirik. Karena itu, dalam nalar keagamaan yang lebih luas, sejatinya perlu pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam dan mendasar

terhadap Islam. Salah satu ayat seringkali dijadikan rujukan untuk memahami Islam adalah: *Sesungguhnya agama di sisi Tuhan adalah islam* (QS Ali ‘Imran [3]:19).

Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud *islam* dalam ayat tersebut? Apakah *islam* sebagai agama atau *islam* sebagai ajaran-ajaran universal yang bernuansa kemanusiaan? Al-Imam al-Qurthuby dalam *al-Jami’ li Ahkam Al-Quran* mengutarakan, bahwa



yang dimaksud dengan *islam* adalah keimanan dan ketaatan, sebagaimana dikatakan oleh Abu al-‘Aliyah dan sebagian besar ulama kalam. Namun sebagian ulama ada yang membedakan antara *islam* dan *iman* merujuk kepada Hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut dijelaskan: *iman* adalah percaya kepada Tuhan, Malaikat, para Nabi, hari akhir, para Utusan Tuhan. Sedangkan *islam* adalah menyembah Tuhan, tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa

di bulan Ramadhan dan menunaikan haji.

Kendatipun demikian, para ulama berpandangan bahwa antara *islam* dan *iman* saling menyempurnakan (*al-tadakhul*), karena makna *iman* adalah penghayatan di hati, pengungkapan di lisan dan pelaksanaan dalam tindakan. *Iman* adalah totalitas dalam keberagamaan, sedangkan *islam* adalah bagian terpenting dalam keberimanan tersebut. Di sinilah sebenarnya letak pertautan antara *islam* dan *iman*. Imam Muhammad al-Razi juga memaknai *islam* sebagai *iman*.

Khalid mas’ud dalam penutupnya memaparkan tentang konsep kemaslahatan yang banyak diteorikan oleh para ahli fikih:

1. *Mashlahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekadar anggapan atau rekaan,

bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya *madharrah* (bahaya atau kemelaratan).

2. *Mashlahah* itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau segolongan kecil masyarakat, tapi harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum.

3. Hasil penalaran *mashlahah* itu tidak berujung pada terbaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syari’ah atau ketetapan yang dipersamakan (*ijma’*). □

(Rif’atul Khoiriyah)

PEREMPUAN CINA DALAM SASTRA MELAYU TIONGHOA

Karya sastra merupakan salah satu medium kebudayaan yang mampu mengekspresikan realitas sosial melampaui sekat periode kesejarahan dan konstruksi sosial tertentu. Sastra dapat hidup dan berkembang tanpa harus bergantung pada mainstream ideologi politik pada zamannya. Dalam wacana kolonial/pasca kolonial, studi sastra (*literatry studies*) adalah senjata perlawanan politik yang bersifat kultural. Studi sastra itu sendiri merupakan inspirasi sekaligus corong awal gerakan anti kolonialisme. Lebih jauh, karya sastra tidak hanya memiliki peran penting dalam perjuangan melawan kolonialisme namun juga menjadi potret pergulatan kebudayaan yang lebih luas.

Oleh karena itu, sosiologi sastra menggarisbawahi bahwa suatu karya sastra memiliki kekuatan sebagai fakta sosial meski tidak bisa diingkari kuatnya peran konstitutif pengarang (*au-*

thor) dalam mendeskripsikan fakta yang dimaksud. Faktor kemajemukan etnik bahkan ideologi sosial politik warga bangsa Indonesia telah mendorong lahirnya warna-warna kesusastraan Melayu. Salah satunya adalah Kesusastraan Melayu Tionghoa. Dalam konteks ini, penelitian *Citra Perempuan Cina Peranakan Dalam Kesusastraan Melayu Tionghoa: Kajian Sosiologis Berperspektif Jender* (2004) bertujuan mengkaji citra (*image*) kaum perempuan etnis Cina berdasarkan karya kesustraan Melayu Tionghoa. Diharapkan penelitian ini dapat menginformasikan potret identitas perempuan Cina sebagaimana dicitrakan oleh

komunitasnya sendiri.

Istilah “citra” merujuk pada gambaran yang dipakai pengarang dalam menampilkan realitas tentang perempuan etnis Cina yang meliputi kualitas fisik, mental, sosial, dan moral sebagaimana yang direfleksikan melalui kedudukan, peran, hak-hak, dan partisipasi kaum perempuan etnis Cina di dalam kesusastraan Melayu Tionghoa. Kesusastraan Melayu Tionghoa sendiri adalah kesusastraan yang ditulis oleh penulis Cina peranakan dengan menggunakan bahasa Melayu-Rendah yang berkembang sejak 1870 hingga 1966.

Objek penelitian ini adalah tiga buah novel karya tiga

pengarang peranakan Tionghoa dalam kesusastraan Melayu Tionghoa, yaitu: *Lo Fen Koei* (1903) karya Gouw Peng Liang, *Cerita Oey Se* (1903) karya Thio Tjin Boen, dan *Nonton Capgome* (1930) karya Kwee Tek Hoay. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural dengan menekankan pada aspek analisis sosiologis untuk membaca konteks dan analisis semiotik untuk menjelaskan fragmen-fragmen ideologi dalam karya sastra tersebut. Relasi antar jender adalah salah satu aspek menonjol dalam ketiga novel di atas. Secara umum, ketiga novel tersebut secara jelas menggambarkan adanya ketidaksetaraan jender dalam masyarakat.

Lo Fen Koei dan *Oey Se* terbit sebagai novel pada tahun yang sama, 1903, dan keduanya terlebih dahulu terbit dalam bentuk cerita bersambung di majalah. Meskipun kedua novel tidak memberikan latar waktu yang jelas, berbagai deskripsi dalam kedua novel itu menunjukkan bahwa persoalan yang digambarkan dalam kedua novel tersebut merupakan persoalan pada jamannya, yaitu ketika Kepulauan Nusantara berada dalam jajahan Belanda, masyarakat pribumi berada dalam strata terbawah dalam struktur sosial. Dengan demikian, perempuan Cina berada dalam situasi subordinat karena



Sepasang pengantin warga Cina. (Dok. PSB-PS, repro internet)

diskriminasi ganda, yaitu mereka menderita ketidakadilan jender karena warisan kultural Cina, dan mereka menderita ketidakadilan jender karena bias kultural budaya dominan Jawa dan Sunda, yang menjadi lingkungan baru mereka.

Dalam *Lo Fen Koei* diilustrasikan bahwa perempuan merupakan subordinat terhadap laki-laki. Setidaknya ada dua hal yang nampak dominan dalam alur ceritanya. Pertama, asumsi bahwa wilayah publik adalah wilayah laki-laki; kedua, asumsi bahwa wanita merupakan objek kesenangan bagi laki-laki, baik sebagai istri muda atau gundik pria kaya. Senapas dengan novel Gouw, Thio Tjin Boen menggambarkan ketidakberdayaan wanita atau istri apabila suaminya mengambil istri muda atau gundik meski istri tua dan mudanya harus hidup secepat. Secara simbolik ketidakhadiran wanita dalam ruang publik tercermin dari tidak disebutkannya nama istri dari Oey Se, tokoh utama, kecuali dengan menyebut "Nyonya Oey Se". Pada sisi lain, tindakan kawin lari yang dilakukan Kim Nio, anak dari Oey Se, dinilai sebagai kedurhakaan dan bukan dilihat sebagai ekspresi perlawanan terhadap sistem patriarkhal.

Citra berbeda digambarkan oleh Kwee tek Hoay dalam *Nonton Capgome*. Ia menempatkan isu



China Moon, karya Drama dan Tari dalam pentas di Goethe Haus 6-8 Maret 2003. (KCM, Akhmad Zamroni)

kesetaraan jender dalam bingkai benturan antara nilai tradisional Cina dan modern. Dalam pandangannya, ketidakadilan terhadap perempuan yang disebabkan oleh bias kultural budaya Cina harus segera diakhiri. Keberpihakan pengarang muncul melalui penokohan Diana Ong, Thomas, dan Frans yang memprotes dominasi nilai tradisional budaya Cina yang patriarkhal. Dalam penilaian pengarang, tidaklah adil bagi perempuan untuk tidak memasuki wilayah publik, termasuk untuk berpartisipasi dalam peristiwa budaya malam *Capgome*.

Analisis terhadap ketiga novel tersebut menunjukkan terjadinya suatu pergeseran pandangan tentang perempuan. Citra perempuan Cina pada *Lo Fen Koei* dan *Oey Se* adalah bahwa kedudukan perempuan itu subordinat terhadap laki-laki, peran perempuan berada di

wilayah domestik, perempuan tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya dan mengelola sumberdaya yang ada di dalam keluarga kecuali sebatas yang diberikan oleh suaminya, perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri, terutama dalam kaitannya dengan memilih pasangan hidupnya, dan perempuan tidak memiliki partisipasi di dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam keluarga, terutama ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi atau mengambil perempuan lain sebagai gundiknya dan ketika orangtua mengambil keputusan tentang jodoh bagi anak perempuan mereka.

Akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan erat antara novel dan realitas sosial yang melingkupi penciptaan novel tersebut. Ketiga novel yang ditulis dalam dua masa berbeda tersebut menunjukkan adanya dinamika di dalam komunitas Cina, terutama dalam kaitannya dengan dialektika antara nilai-nilai tradisional budaya Cina dan nilai-nilai modern Barat. Ketiga novel tersebut juga menunjukkan adanya pergulatan relasi jender yang menghasilkan pergeseran citra perempuan Cina dari subordinat terhadap laki-laki menjadi secara relatif setara dengan laki-laki. Semoga kita menengok masa lalu bukan untuk mereifikasinya namun sebagai taruhan apakah kita mampu melangkah maju pada masa sekarang. □ (rizal)

SENI MENGELOLA KERAGAMAN

KS, Solo

Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS, kembali menyelenggarakan seminar multikultur sebagai bidang yang selama ini menjadi objek kajian yang serius pada tanggal 8 Januari 2005 bertempat di ruang seminar pasca sarjana kampus II UMS. Seminar diselenggarakan guna menggagas berbagai kerusuhan yang sering terjadi terhadap bangsa ini. Dari sambutan kepala PSB-PS UMS, M. Thoyibi menyatakan, bahwa semuanya itu terjadi tak lepas dari realitas bangsa kita yang "Bhineka" dan yang kita yakini sebagai "Tunggal Ika", untuk itu kita perlu "Seni Mengelola Keragaman" guna mencegah konflik yang terjadi.

Seminar yang dihadiri kurang lebih 200 undangan dan peserta umum itu cukup mengundang antusiasisme mereka. Para nara sumber yang diundang dalam seminar memang mereka yang sangat berkompeten dalam bidang ini. Mereka dapat memuaskan dan membawa hal-hal yang menarik seputar temuan-temuan mereka di lapangan. Mereka adalah Prof. Dr. Nasikun (Sosiologi UGM), Dr. Hamim Ilyas (UIN) dan Dra. Yayah Khisbiyah, MA. (PSB-PS). (Alis)



Seminar "Pendidikan Multikultural Sebagai Seni Mengelola Keragaman" oleh PSB-PS UMS. (Dok. PSB-PS)



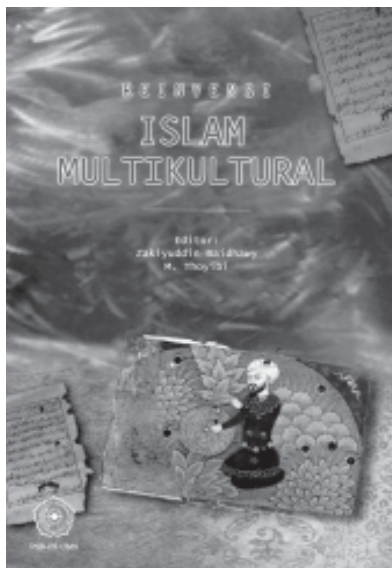
Sebuah Foto hasil garap kegiatan-kegiatan PAS PSB-PS UMS. (Dok. PSB-PS)

Bedah Buku dan Pameran Photo PAS

KS, Solo

Sungguh menarik, itulah komentar atas pameran photo-photo kegiatan PAS (Pendidikan Apresiasi Seni) yang digelar oleh pusat studi budaya dan perubahan sosial universitas Muhammadiyah Surakarta, di balai Soejadmoko, toko buku Gramedia Solo. Program PAS yang photonya dipamerkan, dilaksanakan secara rutin beberapa tahun ini oleh PSB-PS dengan mengambil lokasi di Padang Sumatera Barat dan di Surakarta. PAS mengajarkan nilai-nilai seni tradisi yang luhur secara dini pada anak. Hal itu dapat dilihat dari keceriaan anak-anak dan keseriusan mereka di dalam kegiatan yang berhasil direkam.

Kegiatan ini berlangsung pada 9-14 Juli 2004, dan diadakan pula bedah buku "Pendidikan Apresiasi Seni: Wacana dan Praktik untuk Toleransi Pluralisme Budaya" di tempat yang sama. Adapun nara sumber atau pembedah adalah Prof. Dr. Soetarno (rektor STSI Surakarta), Drs Kuswanto, MM (kadinan Dikpora Solo), dan MH Zaelani Tammaka (budayawan). Alis



Launching dan Bedah Buku

KS, Solo

Buku berjudul “*Reinvensi Islam Multikultural*” hasil seminar yang diadakan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS selama kurun waktu setahun diluncurkan dan dibedah isinya. Buku yang berisi tulisan-tulisan dari antara lain Moeslim Abdurrahman, Haidar Bagir, Zakiyuddin Baidhaw, Ahmad Jainuri, Lies Marcos-Natsir, Paryanto dan Muhammad Azhar, menitikberatkan pada pencarian akar teologis relasi Islam dan multikulturalisme dalam upaya membangun sikap muslim yang multikulturalis.

Acara “launching dan bedah buku” yang dilaksanakan pada tanggal 24 Muharam 1426 H, atau 5 Maret 2005, bertempat di ruang seminar pasca sarjana UMS kampus II. Bertindak sebagai pembicara adalah Dr. Hamim Ilyas, Prof. Dr. Mujiyono Abdillah, dan Drs. HM. Dian Nafi’ (salah satu sumber dari Nahdatul Ulama). *(Alis)*

Pentas seni PAS

KS, Solo

Pentas seni PAS (Pendidikan Apresiasi Seni) sebagai perwujudan program PAS di beberapa Sekolah Dasar. Pentas seni yang diadakan di panggung terbuka STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta), pada tanggal 12 oktober 2004, diikuti oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah I Surakarta, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanganyar, Sekolah Dasar Al-Islam Surakarta dan Sekolah Dasar Al-Irsyad Surakarta, sebagai Sekolah Binaan PSB-PS UMS, menampilkan antara lain seni karawitan, pedalangan dan tari. *(Alis)*

CMC, Colloqium & Morning Coffee

KS, Solo

“Social Justice and Pluralism in Indonesian Muslim” sebagai tema dari CMC yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Budaya Dan perubahan Sosial UMS, pada hari jumat, 20 february 2004, bertempat di ruang seminar Pasca Sarjana UMS kampus II. Dengan pembicara Kamala Chandrakirana (ketua KOMNAS perempuan). *(Alis)*

Worshop Dakwah Multikultural

KS, Solo

Menyikapi hasil sidang tanwir Muhammadiyah tahun 2003 di Makassar, PSB-PS UMS, mengadakan workshop dakwah multikultural, yang bertempat di Hotel Sahid Kusuma Surakarta pada tanggal 6-8 oktober 2004. acara ini bekerjasama dengan Majlis Tabligh & Dakwah Khusus PP. Muhammadiyah. *(Alis)*

Colloqium

KS, Solo

Tanggal 20 Agustus 2004, bertempat di ruang seminar pasca sarjana UMS, kembali PSB-PS UMS, mengadakan Colloqium bertema Masa Depan Islam Progresif di Asia Tenggara. Dengan pembicara Dr. Farish A Noor dari Malaysia, dengan moderator Drs. MA. Fattah Santoso, M. ag. Pada Colloqium sebelumnya 26 maret 2004 ditempat yang sama Prof. Riaz Hasan, guru besar di Departement of Sosiologi di Flinders University, Australia. Dan salah satu pakar sosiologi agama. Juga menjadi pembicara dengan moderator Drs. Maryadi, MA. Dengan tema Religion and Pilitics in Muslim Society. *(Alis)*

MASYARAKAT TIONGHOA SURAKARTA.



Klenteng dan suasana pertokoan Cina (insert) di daerah Coyudan Solo. (Dok. PSB-PS, Farid)

Pecinan di solo.

Jika kita berkunjung ke beberapa kota besar di Indonesia, bahkan dunia, jangan kaget jika kita menemukan satu daerah yang penduduknya dihuni oleh satu etnis atau suku tertentu. Paling tidak yang mendominasi di daerah tersebut. Katakanlah di beberapa tempat di Kalimantan, ada daerah yang bernama Kampung Jawa, dan Kampung Bali. Di Malaysia dan daerah pantai Mali ada kampung suku Bugis. Lalu ada satu tempat jika orang menyebutnya semua orang akan maklum jika daerah tersebut masyarakat yang mendominasinya adalah orang-orang Tionghoa. Pecinan begitu sebutannya, di mana pun tempatnya pasti orang akan tahu keberadaannya.

Di Solo, tidak ada tempat khusus sebenarnya untuk domisili orang-orang Tionghoa. Hanya saja, sesuai dengan pekerjaan mereka, mereka akan tekonsentrasi di daerah perdagangan. Sebut saja

daerah Pasar Gede, jika kita mau sedikit meluangkan waktu untuk berjalan di daerah sekitarnya maka banyak hal yang akan kita temui yang berbau Tionghoa. Apalagi setelah kebijakan presiden Abdurrahman Wahid yang mencabut inpres NO. 14/1967 tentang pelarangan seluruh bentuk kesenian dan kebudayaan Cina untuk di pertontonkan di khalayak umum dengan kepres No. 6/2000, orang etnis Cina seperti mendapat angin segar kembali.

Di kota Solo sendiri kemudian terbentuk perkampungan Cina ini dengan sendirinya. Walau tak ada yang memproklamkan bahwa kampung mereka adalah Pecinan.

Menelusuri jalan di daerah Pasar Gede ke timur sampai pada Jagalan, maka kita bisa menyebut tempat ini sebagai Pecinan, selain dominasi etnis Cina, ada pula beberapa klenteng, masjid, dan yayasan yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa.

Dengan kepres No.6/2000, kini kereka lebih terbuka. Dan sepertinya masyarakat pribumi pun lebih dapat menerima mereka, di samping masih juga kadang ada sikap atau pandangan yang miring terhadap etnis cina.

Jangan panggil aku Cina.

Sejarah masa lalu yang suram bagi orang-orang Cina bisa kita mulai dari pecahnya pemberontakan G 30/S. PKI, atau dikenal juga dengan kebangkitan Pancasila. Lalu pelarangan seluruh bentuk kebudayaan yang berasal dari negeri Cina oleh presiden, dan peristiwa-peristiwa yang melibatkan etnis Cina pada masa kerajaan dan terlebih masa penjajahan oleh Kolonial Belanda, membuat pandangan terhadap orang Cina sangatlah buruk.

Sebutan Cina Pelit, Cina kafir, Cina PKI, Cina Kere dan banyak sebutan bernada buruk lainnya, membuat jurang yang menjadi menganga jauh. Bagai air dan minyak, anjing dan kucing, antara etnis Cina dan pribumi seakan tak lagi dapat diredakan. Padahal tak semua orang Cina pelit, terlibat dalam komunis, miskin, dan kafir yang bagaimana sebenarnya, mereka toh manusia yang beragama juga. Lalu sebagian dari mereka, lebih senang disebut sama dengan kita orang asli Indonesia. Bahkan nama mereka

menggunakan nama orang-orang pribumi, di samping juga menggunakan nama Cina atau marga untuk menghormati leluhur mereka apakah ini patut dicemburui. "Jangan panggil aku Cina", kata Elin mengutip judul sinetron di televisi, mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta ini menegaskan. "Aku memang Cina, margaku Lin, tapi jangan panggil aku begitu, aku orang Indonesia, lahir dan besar di sini."

Rata-rata mereka *minder* juga kalau terlalu dipandang spesial sebagai suatu etnis yang berbeda, padahal manusia itu sama dihadapan Tuhan kata Dito salah seorang siswa SMP ketika

"Jangan panggil aku Cina", kata Elin mengutip judul sinetron di televisi, mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta ini menegaskan. "Aku memang Cina, margaku Lin, tapi jangan panggil aku begitu, aku orang Indonesia, lahir dan besar di sini."

ditanya. Kemudian Agung menceritakan bahwa ia tak bisa berbahasa Cina, mengertipun hanya sedikit, bahkan ada yang tak bisa sama sekali, mereka lebih memilih berbahasa Indonesia kalau di rumah, dan berbahasa jawa jika di sekolah atau berteman

di lingkungan di mana ia tinggal, bahkan mereka mempunyai logat tersendiri ketika berbahasa jawa.

Cina era reformasi

Era reformasi, pasca kerusuhan tahun 1998, banyak hal yang membuat mereka trauma. Kerusuhan yang berkembang menjadi kerusuhan etnik, pembakaran pertokoan, pemerkosaan, dan penjarahan, membuat mereka jadi bertanya, sebenarnya siapa sebenarnya yang lebih baik, tapi trauma itu tak lama, "hidup harus terus jalan mas, masak hanya mau sembunyi, saya mau makan apa," kata salah satu pemilik toko elektronik di Jl.

Slamet Riyadi, yang meminta jangan mencantumkan namanya. Lalu ketika ditanya tentang Kepres No. 6/2000, oleh Gus Dur, ia menjawab "Saya salut sama beliau dan sangat menghormatinya dan bersyukur negeri ini pernah dipimpin oleh Gus Dur."

Memang dirasakan oleh mereka warga etnis Cina di Indonesia, khususnya Solo mereka menyambut era reformasi dengan antusiasme tak keablasan. Mereka membentuk lagi perkumpulan barongsai, membuka pelatihan wushu, dan membuat ormas-ormas demi perkembangan daerah yang mereka tempati. Sebut saja Perkumpulan Barongsai Tri Pusaka, PMS (Perkumpulan Masyarakat

Surakarta), PITI (Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia).

Mereka pula telah banyak menyumbangkan hal yang baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Lalu kita akan sedikit mudah mendapati sebuah lembaga pendidikan atau kursus bahasa yang mencantumkan kurikulum bahasa Cina, walau perkembangannya pun tak seramai kali pertama inpres No.14/1967 dicabut. Tapi kini masih ada beberapa kursus privat khusus yang muridnya adalah anak-anak dari etnis Cina, salah satunya yang dikelola oleh mbak Veronica, "Sekarang *gak* serame dulu mas,

ini hanya untuk kalangan sendiri, sebagai tanggung jawab terhadap nenek moyang saja, biar *gak* lupa sama sejarah," tapi juga mereka mau menerima murid dari etnis lain kalau memang ada yang mau. Lalu media pun sekarang sudah ada terbit dan membacakan beritanya dengan bahasa Cina salah satunya mungkin jika pernah mendengarkan Metro XinWen.

Era keterbukaan sekarang ini mungkin jadi sejarah bagi mereka yang hidup berdampingan antara etnis satu dengan yang lain, bagai mana harus bersikap, bermasyarakat dalam satu

lingkungan, mengutip kembali tulisan pada buletin ini pada edisi pertama, pada tulisan Barongsai, nampak pada kegiatan itu, bahwa bukan hanya jadi pertunjukan belaka, tapi juga wadah untuk menempa anak-anak untuk bagaimana bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan melupakan perbedaan. □

(Ali Sadli)

Kuatnya etos kerja dagang. Seorang wanita Cina mengelola sebuah toko besi di daerah Ledoksari, Jebres Solo. (Dok. PSB-PS, Farid)



BELAJAR DARI PENGALAMAN BERKUNJUNG KE AMERIKA

Ohio University Dialogue Project and Exchange
Program For Islamic Leaders

Chicago, Illinois; Athens, Ohio; Washington D.C; Lancaster,
Pennsylvania; dan Manhattan, New York

23 September-13 Oktober 2004



*Penulis
berpose
dengan latar
foto keluarga
Namibia yang
menolak
modernisasi,
Family Album
of the Planet
Earth,
Millenium
Park, Chicago*

Program ini bernama Ohio University Dialogue Project and Exchange Program for Islamic Leaders. Program yang terselenggara sejak 22 September-13 Oktober 2004 ini sepenuhnya disponsori oleh US State Departement. Program semacam ini gencar dilakukan oleh pemerintah Amerika sejak peristiwa 11 September 2001 yang sangat menggemparkan dunia itu. Dalam program yang dimotori oleh International Studies pada Ohio University, Athens ini sesungguhnya terbagi kedalam empat kelompok, yaitu: kelompok ethnic conflict and conflict resolution yang partisipannya terdiri dari tokoh-tokoh berasal dari wilayah konflik; kelompok antar agama (inter-religious groups); kelompok Young Islamic Leaders di mana saya sebagai salah satu partisipannya; dan terakhir kelompok LSM dan

keagamaan dari Amerika yang akan berkunjung ke Indonesia sekitar bulan Januari-Pebruari 2005.

Sejak awal penyelenggaraan saya sudah memperoleh kesan bahwa program semacam ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk membangun kembali citra diri setelah merosot pamornya oleh ulahnya sendiri, dan mempropagandakan berbagai kepentingan mereka di bawah tajuk International Visiting Program, exchange program, dan semacamnya. Sebagaimana propaganda mereka melalui penyebaran buku-buku tentang Amerika ke sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, dan bahkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga.

Namun demikian, saya juga yakin bahwa dari program semacam ini selalu ada hikmah yang bisa

diambil dalam kerangka dialog antarperadaban dan dialog antaragama. Setidaknya dari sini saya dapat saling belajar dari bangsa-bangsa lain tentang banyak hal, lebih-lebih Amerika yang memang sangat multikultural; belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan dan keragaman; belajar mendengar dari sumbernya yang sejati – apa, siapa dan bagaimana Amerika; dan dari sini diharapkan tumbuh pengetahuan dan berbagi pengalaman yang membuat perubahan-perubahan cara pandang, sikap dan perilaku kita kearah yang lebih baik. Seperti kata pepatah: *he who knows one he knows none*: orang yang hanya mengetahui satu hal, ia belum mengetahui apapun. Dengan

mengenal keragaman di luar diri kita sendiri, sejatinya kita sedang diperhadapkan dengan pengetahuan tentang banyak hal. Di situlah kematangan dan kedewasaan menjadi sebuah kenyataan.

Pembelajaran Multikultural dari Public Space

Suasana multikultural sudah begitu terasa sejak kali pertama saya dan partisipan lain keluar dari bandara internasional O'Hare di Chicago pada 23 September 2004. Di pelataran depan bandara ini kami memdapatkan banyak bendera dari berbagai bangsa di pancangkan di tiang-tiang bendera. Suasana semacam ini menjadi semakin nyata di depan mata ketika kami

melakukan *sightseeing* keliling kota Chicago yang dirancang berbentuk kotak-kotak. Chicago hanya satu contoh riil tentang pluralisme dan multikulturalisme yang tidak lagi semboyan, namun keseharian yang terlalu mudah dijumpai siapapun dari kalangan manapun. Tentu saja upaya membangun konstruk masyarakat multikultural dalam situasi kesatuan dalam keragaman (*Unity in Diversity*) bukan melulu diselenggarakan melalui *political recognition* pemerintah US atas unsur-unsur pembentuk negara-bangsa Amerika yang berasal dari semua bangsa di dunia ini dan adopsi terhadap berbagai identitas kultur dan etnik serta agama di bawah panji kebebasan, namun juga perlu ada strategi kebudayaan untuk mengakomodir dan mengadopsi serta mengadaptasi keragaman itu.

Upaya-upaya semacam ini ternyata dapat dilakukan melalui optimalisasi dan maksimalisasi pendayagunaan sarana dan ruang-ruang publik dalam mana berbagai lapisan masyarakat dapat berkumpul dan bertemu, antara lain: *sidewalk* (trotoar) yang luas dan nyaman bagi para pejalan kaki yang dapat mengantisipasi senggolan fisik yang dapat menjadi sumber konflik; metro dan subway yang dijalankan serba elektrikal dan efisien namun nampak beradab karena ada etika bahwa tempat duduk penumpang diprioritastas bagi mereka yang lebih tua (*elders*) dan orang cacat (*disabili-*



Perempuan berkebangsaan Spanyol mengabdikan hidupnya selama 24 tahun menentang kebijakan US dalam konflik Palestina, Irak, dan Afghanistan di depan halaman Gedung Putih.

ties); taman-taman kota yang cukup teduh dan rindang, seperti Lincoln Park Zoo di Chicago dan Central Park di Manhattan, New York misalnya, dengan berbagai sarana olahraga, museum dan tempat bersantai, yang menjadi saluran katalisator bagi penduduknya dari berbagai kesumpekan dan rutinitas hidup yang membosankan; dan berbagai pameran (*exhibition*) yang berlangsung di ruang-ruang publik tersebut, seperti kami saksikan di Millenium Park, Chicago.

Di taman ini berlangsung sebuah pameran foto bertajuk *Family Album of the Planet Earth* pada Sabtu, 25 September 2004. Pameran ini menampilkan karya tunggal Uwe Ommer, seorang fotografer terkenal kelahiran Perancis, yang telah berkeliling dunia untuk bertemu dengan dan mengenal berbagai keluarga dari penduduk dunia ini. Sesuai dengan temanya, pameran foto ini menampilkan foto-foto semua keluarga dunia yang pernah ia jumpai, termasuk keluarga Indonesia. Karya-karya tersebut juga menyajikan beragam latar belakang dan cita-cita keluarga – dari yang progresif sampai yang paling anti modernisasi. Saya menyempatkan diri foto di Millenium Park ini, juga berfoto dengan latar foto keluarga

Namibia dengan tema “To Reject Modernisation”. Pameran semacam ini dilakukan di tempat terbuka, mudah diakses semua anggota masyarakat dengan tanpa bayar. Secara kultural dapat dipahami bahwa pameran ini ingin mengajak pamirsa dan peminatnya ke sebuah dunia nyata

Upaya mengkonstruksi masyarakat multikultural dalam situasi kesatuan dalam keragaman (*Unity in Diversity*) tidak hanya perlu *political recognition* suatu pemerintah atas unsur-unsur pembentuk negara-bangsa, adopsi terhadap berbagai identitas kultur dan etnik serta agama di bawah panji kebebasan, namun juga perlu ada strategi kebudayaan untuk mengakomodir dan mengadopsi serta mengadaptasi keragaman itu.

bahwa kita bertetangga dengan mereka yang berasal dari keragaman – bangsa, warna kulit, ras, agama, sikap dan pandangan hidup, dan sebagainya. “Semuanya ada di sini, di dalam rumah kita sendiri, yakni satu dunia beragam penghuni”.

Menyaksikan Columbus Day Parade juga suatu pengalaman menarik berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi semua lapisan masyarakat dan warga negara US yang sangat plural, dari berbagai bangsa, ras, warna kulit, etnik, dan agama. Meski yang paling menonjol dalam parade yang saya saksikan di New York ini

lebih menonjol barisan dari komunitas Itali, namun itu tidak mengurangi betapa suatu *melting pot* atau *salad bowl society* a la Amerika dapat dikelola secara sehat.

Perempuan berkebangsaan Spanyol mengabdikan hidupnya selama 24 tahun menentang kebijakan US dalam konflik Palestina, Irak, dan Afghanistan di depan halaman Gedung Putih

Ruang publik juga merupakan tempat yang sangat terbuka untuk semua warga negara dalam rangka kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat secara tulis maupun lisan meski bertentangan sama sekali dengan kebijakan para penguasa. Aksi demonstrasi di alun-alun utama Washington D.C, tepat diantara Gedung Putih dan Tugu

George Washington digelar. Anggota masyarakat yang melakukan unjuk rasa ini menentang keras kebijakan-kebijakan George W. Bush dan pemerintah US dalam perang Irak, dalam mana ratusan tentara US gugur, ribuan tentara dan penduduk sipil Irak tewas, belum lagi korban material yang sangat besar. Tepat pada hari yang sama, digelar juga aksi menentang kebijakan IMF dan WTO. Bahkan ada seorang perempuan berkebangsaan Spanyol telah menghabiskan hidupnya selama 24 tahun untuk melakukan protes atas kebijakan US terhadap

konflik Israel- Palestina, dan atas tindakan Bush menyerang Afghanistan dan Irak sebagai terorisme. Selama itu pula, perempuan tua ini tidak pernah memotong rambutnya. Ia hanya berlingung di sebuah tenda kecil yang sangat sederhana, tak kenal panas, hujan dan salju, tepat di depan halaman Gedung Putih. Katanya, ia akan terus melakukan protes ini untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, mungkin sampai ajal menjemputnya. Satu demonstrasi lain yang kontras dengan semangat perempuan adalah demonstrasi orang-orang Yahudi yang menyatakan tanah Israel adalah milik bangsa mereka. Mereka menggelar aksi ini di dekat gedung PBB, New York, dengan memanfaatkan anak-anak bawah umur untuk memprovokasi massa mereka dengan teriakan "No Arabs, No Terrorist"!, dan provokasi lain yang diucapkan dengan bahasa Ibrani.

Penutup

Pengalaman ini, bagaimanapun, sangat berarti bagi saya khususnya yang baru pertama berkunjung ke US. Sebuah negeri penuh dengan paradoks – antara demokrasi dan diskriminasi, antara kebijakan domestik yang anggun dan kebijakan luar negeri yang

congkak, antara penegakkan HAM dan pre-emptive action, antara kehalusan sastra dan kekerasan jingoisme. Program pertukaran kultural dan dialog semacam ini esensinya memiliki makna yang strategis untuk membangun dialog antarperadaban, *jika dan hanya jika* ia dibangun atas dasar prinsip kesetaraan dan bukan *sense of superiority* dan hegemoni/ dominasi; bertukar pikiran secara terbuka dan penuh ketulusan, bukan arogansi dan menang sendiri. Hanya dengan cara ini dialog dan pertukaran antarperadaban dapat membuka

gerbang harapan (*threshold of hope*) untuk relasi antarbangsa dalam harmoni, saling menghargai dan memahami.

Surakarta, 20 Oktober 2004
Zakiyuddin Baidhawiy



Minat warga Amerika untuk belajar Islam semakin meningkat pasca 9/11, sekelompok Muslim muallaf tampak sedang mengikuti ceramah Syamsi Ali, Imam Besar Islamic Center New York.